STUDI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Skripsi

Program Sarjana S-1

Jurusan Ilmu Politik

Oleh :

Muhammad Abdul Majid

1806016020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Muhammad Abdul Majid
NIM	:	1806016020
Jurusan	:	Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Studi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembanguna Kepariwistaan Daerah Kabupaten Jepara

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Solkhah Mufrikah. M.Si
NIP. 198505102023212058
Tanggal : 13 Jubi 2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Oleh:

Muhammad Abdul Majid

Telah ditetapkan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal dan dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 198505102023212058

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Penguji I

Drs. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

Penguji II

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Pembimbing I

Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 196805051995031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

Oleh:

Muhammad Abdul Majid

Telah ditetapkan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal dan dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 198505102023212058

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Penguji I

Drs. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

Penguji II

Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Pembimbing I

Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 196805051995031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperolah gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi atau universitas di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,13 Juni 2025

Muhammad Abdul Majid
NIM.1806016020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "STUDI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA". Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi, diantaranya

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Muhammad Nuqlir, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.-
4. Masrohatun, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
5. Solkhah Mufrikah, M.Si, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau.
6. Segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Segenap Pihak DPMTSP Kabupaten Jepara
8. Segenap pihak DISPARBUD Kabupaten Jepara
9. Segenap informan dalam penelitian ini
10. Mahfudh, S.E, dan Ambar Setiyowati S.pd selaku kedua orangtua penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini dengan sangat sabar sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

11. Saudara penulis, Muhammad Zaki Nafis, dalam kecuekan dia selalu mendukung kakaknya dengan caranya sendiri
12. Almarhumah Karsiyam, nenek penulis, mendiang nenek selalu memberikan segalanya buat penulis, selalu mendoakan penulis, menyemangati penulis untuk menyelesaikan kuliah sampai akhirhayatnya, sayang seribu sayang mendiang nenek telah berpulang keRahmatullah tanpa melihat cucunya menjadi sarjana
13. Segenap teman-teman, Kireyvin, Allika, Eko, Dohan, Nurdin, Dika, Zidan yang selalu mendukung penulis dikala senang maupun sedih, menjadi tempat untuk mengeluarkan keluh kesah kehidupan
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik UIN Walisongo 2018, teman-teman seperjuangan di beberapa organisasi lainya dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
15. Segenap keluarga dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Penulis berharap agar karya dan ilmu penulis berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan terselesainya skripsi ini dengan perjalanan yang panjang, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tua penulis Bapak Mahfudh S.E dan Ibu Ambar Setiyowati S.Pd
2. Almamter UIN Walisongo Semarang sebagai tempat bagi penulis untuk menimba ilmu
3. Pengelola pariwisata yang sudah membantu penulis, memberikan kesempatan untuk mencari wawasan, informasi terkait industri pariwisata di Kabupaten Jepara

MOTTO

“KULIAH ITU ADALAH SEBUAH MEDAN PERANG YANG TERLALU INDAH UNTUK DIAKHIRI DENGAN KATA MENYERAH”

(ALIT SUSANTO)

ABSTRAK

Pembangunan kepariwisataan saat ini menduduki posisi yang cukup tinggi di Kabupaten Jepara yang secara langsung berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan. Olehkarena itu diterbitkanlah perda no 6 tahun 2018 yang mengatur berjalannya pembangunan kepariwisataan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan ini sudah berjalan, serta kendala apa yang menjadi faktor penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian implementasi perda ini menunjukan sudah berjalannya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Jepara, hal ini di tandai dengan pembangunan fasilitas obyek wisata seperti Pantai Bandengan dan Pantai Kartini secara seerius. Untuk penambahan obyek wisata lain masih tetap diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Tentu dalam menjalankan sebuah kebijakan terdapat sebuah kendala yang dialami, baik internal maupun eksternal. Peneliti menyarankan agar pemerataan pembangunan wisata dapat segera digalakkan mengacu pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara sangatlah beragam, mulai dari pantai, air terjun, perkebunan kopi, serta wisata alam lainnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Kepariwisataan, Sumber Daya Alam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
LEMBAR PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
ABSTRAK ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 5
C. TUJUAN PENELITIAN 5
D. MANFAAT PENELITIAN 6
E. TINJAUAN PUSTAKA 6
F. METODE PENELITIAN 11
1. Jenis penelitian 11
2. Sumber Data 11
3. Teknik Pengumpulan Data 12
4. Teknik Analisis Data 14
BAB II 15
KERANGKA TEORI 15
A. Teori implementasi 15
BAB III 20
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI JEPARA 20
A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara 20
1. Profil Geografis 20
2. Profil Demografi 25
3. Sejarah Pariwisata Di Jepara 27
B. Perkembangan Sejarah Priwisata Kabupaten Jepara Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 - Awal Abad ke-20) 31
1. Perkembangan Seni dan Kerajinan (1970-an) 31

2. Pariwisata Alam dan Perkembangan Infrastruktur (1970-an hingga 1990-an).....34
3. Kebangkitan Pariwisata di Era Reformasi (2000-an hingga Sekarang).....36
4. Pariwisata Berkelanjutan dan Tantangan Masa Depan.....38
BAB IV.....41
IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUK KEPARIWISATAAN DAERAH KABUTEN JEPARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.....41
1. Komunikasi.....44
2. Sumber Daya 45
3. Disposisi Implementor.....46
4. Struktur Birokrasi 47
A. Hambatan Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara. 48
1. Lingkup Kebijakan 48
2. Sumber daya 49
3. Disposisi Implementor.....50
4. Komunikasi.....50
B. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Di Bidang Pariwisata Agar Berjalan Sesuai Dengan Tujuan Perda Yang Telah Ditetapkan.....51
BAB V.....55
IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUK KEPARIWISATAAN DAERAH KABUTEN JEPARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PARIWISATA JEPARA.....55
A. Implementasi perda no 6 tahun 2018 tentang rencana pembangunan induk kepariwisataan daerah kabupaten Jepara. 55
1. Komunikasi.....55
2. Sumber Daya 56
3. Disposisi Implementor.....57
4. Struktur Birokrasi 58
B. Hambatan Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara. 59
1. Lingkup Kebijakan 60
2. Sumber daya 61
3. Disposisi Implementor.....62

4. Komunikasi 63
C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata Agar Berjalan Sesuai Dengan Tujuan Perda Yang Telah Ditetapkan 65
D. Hambatan Internal Dan Eksternal Dalam Iplementasi perda No. 6 Tahun 2018 Mengenai Pengembangan Obyek Wisata 69
1. Faktor Internal 69
2. Faktor Eksternal 69
BAB VI 71
KESIMPULAN DAN SARAN 71
A. KESIMPULAN 71
B. SARAN 71
Daftar Pustaka 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 topografi desa 24
Tabel 2 profil demografi 26
Tabel 3 jumlah penduduk dan kepadatan penduduk 27
Tabel 4 Jumlah Obyek Wisata menurut Klasifikasi di Kabupaten Jepara, 2024 29
Tabel 5 banyaknya wisatan yang berkunjung ke obyek wisata 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 teori implementasi george edward III 15
Gambar 2 Wawancara Dengan Kepala Dinas DPMTSP 78
Gambar 3 Wawancara Dengan Kabid Destinasi DISPARBUD 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan serta terdiri dari berbagai macam pulau sehingga Indonesia memiliki banyak budaya dan bahasa, hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indoesia guna dimanfaatkan sebagai dayatarik objek wisata yang dapat menarik kunjungan dari berbagai macam wisatawan. Pariwisata bisa dikatan sebagai industri dikarenakan kegiatannya yang berorientasikan pada produktifitas dan komersil, daya tarik wisata adalah dasar kepariwisataan, dengan tidak adanya suatu daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah akan sulit untuk mengembangkan sektor pariwisatanya, akan tetapi daerah yang memiliki obyek wisata lebih dari satu akan dapat lebih mudah mengembangkannya.

Pengembangan pariwisata merupakan hal yang cukup penting untuk setiap negara tidak terkecuali negara Indonesia, perkembangan pariwisata yang pesat di negara Indonesia dapat memicu perkembangan fisik fasilitas serta sarana pendukung pariwisata lainnya, dengan seiring bertambahnya kunjungan dari wisatawan, maka diperlukan sebuah regulasi atau kebijakan untuk mengatur serta membentuk sebuah sitem kepariwisataan yang terstruktur dengan jelas sehingga menciptakan pariwisata yang kondusif, karena dengan kondusifnya sektor pariwisata akan menarik banyak wisatwan maupun investor, serta perkembangan dalam sektor wisata dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. (Lestari, 2020: 1)

Salah satu pulau yang memiliki banyak keanegaragaman budaya serta potensi wisata yang cukup menarik adalah pulau jawa, salah satu provinsi dipulau jawa yang memiliki tempat yang cukup strategis adalah Jawa Tengah karena letaknya tepat ditengah pulau jawa, sehingga dapat di akses dengan mudah oleh penduduk di pulau jawa. Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki cukup banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk pariwisata, dengan daya tarik yang dimiliki dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang mampu menarik minat para pengunjung baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.

Otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwasannya setiap daerah memiliki hak untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah, yang ditujukan untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Jepara memang terkenal dengan slogan kota ukir, akan tetapi industri yang berkembangkan di Jepara tidak hanya furniture melainkan banyak industri yang berkembang seperti, tenun troso, kerajinan monel serta pariwisata dengan mengandalkan letak wilayah Jepara yang berada di tepi pulau jawa membuat Jepara memiliki banyak wisata pantai yang sangat menarik.

Untuk mengatur dan mengembangakan industri pariwisata di Kabupaten Jepara, pemerintah Jepara telah menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2033. pada Perda tersebut disebutkan bahwa adanya visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan unggulan yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kabupaten Jepara. Adapun tujuan dari dibuatnya perda tersebut dimuat dalam Pasal 5 yaitu:

1. Memanfaatkan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara agar menjadi salah satu pendapatan asli daerah serta tidak lupa tetap menjaga pelestarian yang berkelanjutan.
2. Melakukan peningkatan dan kuantitas daya tarik wisata
3. Melakukan peningkatan dalam pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata
4. Melakukan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Jepara
5. Membuka peluang lapangan kerja serta kesempatan berbisnis di bidang pariwisata
6. Melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang bergelut dibidang pariwisata

Dinas pariwisata Kabupaten Jepara harus melakukan upaya yang lebih dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara langsung, dikarenakan masih banyak potensi yang belum dikembangkan membuat destinasi wisata hanya terpusat di beberapa tempat

saja, kurang meratanya pengembangan obyek wisata yang berada di Kabupaten Jepara membuat banyak wisatawan lokal atau wisatawan asing tidak mengetahui bahwa Jepara mempunyai banyak sekali potensi wisata yang sngat menarik untuk di kunjungi. Bukan hanya terbatas wisata pantai saja, melainkan banyak wisata alam lainnya, seperti wisata hutan pinus, serta banyak wisata air terjun, sampai wisata religi.

Dalan beberapa tahun belakangan ini di Kabupaten Jepara mulai bermunculan desa-desa wisata yang menawarkan potensi wisata alamnya, pemkab Jepara merilis 24 desa di Jepara yang dikategorikan menjadi desa wisata pada tahun 2020, dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 sudah ada lagi desa-desa wisata yang bermunculan dengan menawarkan potensi alam yang berbeda-beda, seperti desa Somosari yang terletak di kecamatan Batealit ini memeiliki beragam obyek wisata mulai dari pegunangan serta beberapa air terjun. Beragamnya potensi alam ini kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Jepara, mulai dari infrastruktur sampai pemasaran desa wisata sendiri, membuat banyaknya desa wisata di Jepara susah untuk berkembang. (Admin, Daftar Desa Wisasta , 2020)

Dalam kebijakan ini juga memiliki tujuan terkait peningkatan investasi di bidang pariwisata di Jepara, untuk saat ini kabupaten jepara hanya menawarkan satu investasi di bidang pariwisata yaitu pengembangan potensi wisata pulau panjang kepada para investor dengan nilai investasi 30 milyar, investasi ini akan membuat Aqua Edu Culture Park – Panjang Island yang memiliki daya saing tinggi serta menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para wistawan. Masih banyak lagi obyek wisata yang dapat dikembangkang melalui investasi, dan tidak hanya berfokus pada wisata air agar pembanguanan serta pengembanagan pariwisata dijepara dapat merata. (Admin, Pengembangan Aqua Edu Culture Park Panjang Island, 2021)

Tidak hanya sampai disitu, upaya pemerintah daerah dalam pembangunan pariwasata agar tidak terhambat serta merugikan pembangunan dalam industri pariwisata, Pemerintah Jepara memiliki strategi yang termuat dalam pasal 18 ayat 2 Perda No. 6 Tahun 2018 yaitu dengan mengembangkan inovasi manajemen daya tarik wisata, memperkokoh upaya konservasi potensi daya tarik wisata, serta memperkuat upaya penataan ruang wilayah.

Dalam perda nomor 6 tahun 2018 juga memuat mengenai ruang lingkup kebijakan dari kebijakan ini yang termuat dalam pasal 2 yaitu:

1. Destinasi pariwisata
    a. Perwilayahan pembangunan DPD
    b. Pembangunan daya tarik wisata
    c. Pembangunan eksebilitas pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
    a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial
    b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal
3. Industri Pariwisata
    a. Peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata
    b. Pengembangan manajemen dan pelayanan serta penguatan struktur pariwisata dan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah
4. Kelembagaan pariwisata
    a. Pengembangan organisasi kepariwisataan
    b. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pembangunan wisata sendiri memiliki banyak kendala yang harus di hadapi, baik masalah yang timbul oleh masyarakat sendiri ataupun dari dalam lembaga yang melaksanakan kebijakan ini. Seperti kendala anggaran atau pada pelaksanaan kebijakan sendiri, Dalam mengahadapi kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi, pemerintah diharapkan dapat berkomunikasi secara baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata. Dimana komunikasi menjadi peran penting seperti yang dikemukakan oleh George Edward tentang teori implementasi kebijakan bahwasannya komunikasi yang baik akan membuat proses implementasi dapat berjalan secara efektif. (Nugroho, 2014: 264)

Kajian mengenai studi implementasi perda pembangunan pariwisata ini sebelumnya sudah dilakukan dan diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya yaitu Muhammad Ikhsan yang meneliti implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dikabupaten Garut. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah berjalan akan tetapi sedikit perubahan yang terlihat, seperti

minimnya fasilitas penunjang didaerah wisata, serta proses pengembangan belum mengarah pada pengembangan wisata yang berkelanjutan dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata menyebabkan pemerintah sulit untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk membahas dua masalah berdasarkan pemaparan latar belakang diatas ditetapkan pertama, mengenai implementasi perda yang sudah dibuat, peneliti akan menganalisis sejauh mana implementasi perda tersebut terhadap destinasi pariwisata di Jepara, kendala apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan ini serta menjelaskan hasil secara jelas berjalan atau tidaknya perda tersebut untuk pengembangan pariwisata di Jepara, kedua mengenai iklim investasi dibidang pariwisata, dengan demikian pengembangan pariwisata dapat berkembang lebih luas dan memiliki daya saing yang tinggi. Alhasil peneliti menentukan topik yang telah dipaparkan membahas tentang *"Studi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara"* dengan studi kasus pada obyek wisata di Jepara Tahun 2018-2022.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang daiatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini :

a. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara ?
b. Bagaimana Perkembangan Investasi di Bidang Pariwisata setelah diterbitkannya Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diambil oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini dapat di paparkan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi perda perda nomor 6 tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten Jepra
b. Untuk mengetahui sejauh mana investasi di bidang pariwisata berkembang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian lain yang sejenis.
    b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemberdayaan di lingkungan pariwisata masyarakat Jepara.
    c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait implementasi kebijakan tentang rencana pembangunan induk kepariwisataan di daerah jepara.
2. Manfaat praktis
    a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada pembaca serta peneliti lainnya mengenai adanya perda nomor 6 tahun 2018 tentang rencana pembangunan induk kepariwisataan daerah kabupaten Jepara .
    b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi berupa pemikiran bagi para penelitian lainnya serta dapat memberikan tambahan literartur dan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengembangan daerh wisata yang nantinya akan dibuat menjadi bahasan dalam penelitian ini. Peneliti akan memaparkan beberapa tulisan yang memiliki tema yang sama, adapaun karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rita Putri Andini (2019) dengan judul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Dalam Perspektif Hukum Islam"* adapun hasil dari penelitian ini adalah, penerapan perda Kabupaten Lampung Barat No.2 Tahun 2016 ini masih belum maksimal, terdapat beberapa kendala yang sulit diatasi karena kurangnya anggaran dana dari pemerintah, serta akses menuju wisata Lombok Ranau

cukup jauh dari pusat kota dan sulit bersaing dengan destinasi wisata lainnya di daerah Lampung, serta fasilitas yang kurang memadai di sekitaran lokasi wisata sehingga menjadi tempat yang terkesan kotor dan tak terawat menjadi masalah tersendiri yang sulit untuk diseleseaikan akibat dari kekurangan anggaran dan tersebut.

Kedua¸ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan (2018) dengan judul *"Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Sinjai"* hasil dari penelitian ini adalah, terkait implementasi kebijakan sudah dilakukan perubahan yang sedikit maju akan tetapi fasilitas penunjang belum dimaksimalkan, ini membuktikan Kabupaten Sinjai belum mengarah pada pengembangan wisata yang berkelanjutan, usaha pemerintah dalam meberdayakan masyarakat juga belum menemui hasil yang baik dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata di Kabupaten Sinjai. Terdapat beberapa faktor kendala yang menghambat penyelenggaraan kepariwisataan ini, anggaran menjadi salah faktor utama dalam implementasi kebijakan ini, ditambah kurangnya SDM yang sangat terbatas membuat kebijakan ini belum cukup efektif sesuai harapan.

Ketiga, Skripsi yang disusun Arif Fahmi (2014) yang memiliki judul *"Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta"* hasil dari penelitian ini adalah, dalam implementasi penyelenggaraan Kepariwisataan telah berjalan dengan baik, terwujudnya hubungan baik baik antara dinas pariwisata dengan masyarakat serta instansi-instansi pemerintah lain, serta peran masyarakat yang ikut andil dalam pengembangan ini membuat dampak yang cukup positif, dengan masyarakat ikut menjaga keamanan, kebersihan, dan pelestarian dikawasan obyek wisata berdampak pada peningkatan kunjungan wisata. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan ini juga terdapat hambatan-hambatan yang di hadapi, seperti daya dukung infrastuktur, sumberdaya manusia.

Ke-empat, skripsi yang disusun oleh Tititn Mufitro (2012) yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Srudi Terhadap Implementasi Perda No 8 Tahun 2011 Kabupaten Gresik Tentang RTRW 2010-2030 Di Pulau Bawean Gresik)* hasil dari skripsi ini adalah, implementasi pengembangan wisata ini

belum berjalan dengan baik, pembuatan peraturan perundang-undangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, setiap item satu tahun, sehingga susah untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi pengembangan ini. Pengembangan di sektor wisata ini kebanyakan masih dikelola secara individu atau kelompok, sehingga susah untuk berkembang dengan tidak adanya support dari pemerintah. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) membuat kurang efektif dan efesian pengimpletasian kebijakan yang ada. Serta yang menjadi masalah untama dari pengembangan wisata pulau bawean ini adalah moda transportasi, untuk menghubungkan antara pulau bawean dengan pulau jawa hanya asda satu kapal dan kondisinya jauh dari kata layak.

Ke-lima, Jurnal ilmiah *Conference on Public Administration and Society* volume 1 yang ditulis oleh Erna Rustiana dkk (2019) dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pembangunan kepariwisataan Di Kabupaten Garut"* hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi terdapat kendala dalam proses pembangunannya sehingga pembangunan tidak dapat diselesaikan dengan baik, alhasil imbas dari pembangunan yang tidak dapat diselesaikan berdampak pada daya tarik wisata yang kuranng menarik berdampak pada minat kunjungan dari wisastawan. Kurang optimalnya sistem informaasi yang memadai membuat wisatawan sulit untuk menentukan destinasi wisata di daerah Garut.

Ke-enam, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Volume 9 yang dirulis jawa ini didasarkan pada arah pembangunan kepariwisataan yang tertuang dalam RPJN 2005-2025, Disporpar Provinsi Jawa Tengah telah membuat masterplan karimunjawa, pemerintahan yang bergerak dibidang pariwisata juga telah melakukan promosi dan pegembangan kapasitas SDM yang bergerak dibidang wisata, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di Karimun Jawa, seperti permasalahan mengenai sampah, air beersih menjadi isu tersendiri dikarenakan alih fungsi lahan yang dahulunya adalah area resapan air menjadai hotel dan restoran, rusaknya terumbu karang serta biota laut lainnya akibat kegiatan snorkling menjadi dampak dari pengembangan ini yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Pihak pemerintahpun telah mengupayakan untuk mengatsi hal tersebut, seperti contoh PDAM telah melakukan perencanaan pada tahun 2018 untuk mengatasi masalah air

bersih serta rusaknya terumbu karang, ada 2 opsi yang akan dilaksanakan oleh PDAM, yang pertama dengan membuat bendungan pada teluk, dan untuk mengatasi rusaknya terumbu karang warga masyarakat sepakat untuk menghentikan sementara aktifitas wisata yang ada di salah satu pulau menjagan kecil selama 3 tahun agar daerah tersebut dapat pulih kembali. Untuk mengatasi rusaknya biota laut tourguide telah menghimbau pada wisatawan yang melakukan kegiatan snorklelling agara tidak menyentuh biota laut serta menginjak terumbu karang selama kegiatan snorkelling dilakukan.

Ke-tujuh, Jurnal ilmiah Katalogis volume 4 yang ditulis oleh Agustina Pallewa (2016) yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara"* hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwasannya secara keseluruhan implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan optimal, kurangnya komunikasi antara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dengan masyarakat menyebabkan target dalam visi dan misi pembanguanan sulit dicapai, pemerintahan Kabupaten Toraja dirasa kurang dalam hal menjelaskan tupoksi dan struktur birokrasi yang jelas sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan yang mementingkan kepentingan sektoral,

Ke-delapan, Jurnal Ilmiah *Hospitality Management* volume 8 yang ditulis oleh I Ketut Purnaya dkk (2018) yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya pengembangan pariwisata Di Kota Denpasar"* hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal penataan sungai sudah cukup baik, akan tetapi kebijakan pemerintah belum berjalan secara optimal dalam pengendalian pencemaran air, adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Denpasar dalam penataan sungai badung menjadi salah satu tujuan destinasi wisata air yang tertuang pada perda No 27 Tahun 2011-2031, pemerintah Kota Denpasar juga telah melakukan pencegahan guna menjaga kelesteraian lingkungan dengan melarang dan menetapkan sanksi denda bagi setiap orang yang membuang sampah ke sungai.

Ke-sembilan, Jurnal ilmiah Moderat yang ditulis oleh Shafira Mediana Putri dkk (2020) yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geoprak"* hasil dari penelitian ini adalah, pengembangan kawasan pariwisata *Geopark* Ciletuh juga dipengaruhi oleh variable

seperti yang dikemukakan oleh Van Metter, yang pertama, dimensi sasaran dan tujuan kebiajakan, bisa dibilang pengembangan kawasan wisata ini belum sepenuhnya tercapai, kedua, dimensi sumberdaya, pelaksanaan kebijakan ini belum bisa memenuhi kualitas untuk sumberdaya manusia, sumberdaya infrastruktur serta sumber dana terkait anggaran, ketiga dimensi disposisi, pelaksana kebijakan ini, mulai dari Pemerintah Kabupaten meliputi Pemerintah Dinas Pariwisata, Pemerintahan Desa, PAPSI, juga masyarakat dilihat dari telah dilaksanakannya tugas sesui PERGUB No. 72 Tahun 2018, keempat, dimensi Karakteristik Agen Pelaksanaan, implementor dari kebijakan ini sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya, akan tetapi tindakan dari agen implementor belum mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan kegiatan pendekatan terhadap masyarakat. kelima, dimensi komunikasi, terlihat bahwasannya koordinasi yang dijalin oleh agen pelaksana dengan organisasi belum berjalan secara intensif. Keenam, dimensi kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, lingkungan ekonomi yang mendukung serta mendorong perekonomian warga sekitar, kondisi sosial disekitar lokasi wisata juga sangat mendukung akan tetapi terjadi kekhawatiran membawa pengaruh buruk, lingkungan politik juga turut serta dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan dimasukkannya pengembangan Ciletuh kedalam program prioritas,

Ke-sepuluh, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara volume 10 yang dibuat oleh Cecep Wahyu Hoerudin (2018) yang berjudul *"Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Cirebon"* hasil dari penulisan karya ilmiah ini adalah, menganut teori dan dimensi dari Edward III, komunikasi yang didapatkan dilapangan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan adanya 2 pengelola wisata tersebut membuat berbagai macam konflik yang timbul antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), sumberdaya manusia juga belum maksimal, kurangnya tenaga ahli dibidang IT, serta pemahaman bahas asing, menjadi penghambat dalam melaksanakan pengembangan. Disposisi sudah berjalan dengan semestinya.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang nantinya akan dibutuhkan oleh peneliti untuk penelitian tersebut, adapaun tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa metode metode penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara, dengan menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, menurut (Creswell, 2008) metode penelitian kualitatif merupakan sebuah proses guna melaksanakan tahapan yang harus diawali dengan mengidentifikasi sebuah problem yang akan diteliti, selanjutnya akan dilakukan review kepustakaan untuk menentukan dan mempertegas tujuan dari penelitian ini setelah semua masalah telah terinditifikasi, sehingga kegiatan ini berjalan dalam satu tahapan proses yang berurutan dan teratur.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, (Wahyuningsih, 2013) menjelaskan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti akan mencari sebuah fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan seperti program serta mengumpulkan informasi yang diperoleh secara detail serta mendalam dengan menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, adapun pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta laporan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan dengan peneliti melakukan investigasi terhadap suatu proses pembutan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2033 sehinnga dengan menggunakan pendekatan jenis ini mampu membawa penelitian ini kepada kondisi lapangan yang terjadi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, sumber data primer dan sekunder

a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objek penelelitian, data primer ini dapat didapatkan dari dokumen-dokumen proses pembuatan Peraturan Daerah serta hasil dari wawancra dari informan tentang bagaimana proses pembuatan serta implementasi dari Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kbupaten Jepara
b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti sebagai pendukung dari sumber data primer. Data sekunder bisa didapatkan melalui media massa, buku, artikel ilmiah, buku yang berkaitan dengan Perda No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kbupaten Jepara Tahunn 2018-2033 Di kabupaten Jepara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang akan digunakan oleh peneliti guna mempermudah untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teknik wawancara, teknik observasi, teknik dokumentasi.

a. Wawancara

   Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan dengan teknik observasi ataupun kuisioner dikarenakan peneliti tidak bisa melakukan observasi seluruhnya. Dengan demikian peneliti selayaknya melakukan interview dengan membuat pertanyaan kepada informan atau partisipan, dengan mengajukan pertanyaan akan membantu dalam mendapatkan persepsi, pendapat, pikiran, peristiwa serta fakta dilapangan. Dengan memberikan pertanyaan yang mendalam peneliti akan mendapatkan informasi yang luas dan mendalam yang nantinya akan digunakan menjadi bahan dasar yang akan dianalisis nantinya. (Raco, 2010)

   Pada penelitian kali ini metode wawancara akan dilakukan dengan pihak DISPARBUD kabupaten Jeapara yaitu Bapak Zamroni Lestiaza, AP,

M.Si selaku kepala dinas, Bapak Agus Wibowo, SE, MM selaku kabid pemasaran pariwisata, Iana Cholidah, S.Sos, M.M selaku seksi promosi wisata, Hery Yulianto, S.STP, M.Si selaku kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DMPTSP) Kabupaten Jepara, serta para pengelola obyek wisata, para pelaku UMKM,

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data secara langsung yang diperoleh dari lapangan. Tidak semua data dapat didapatkan dalam sebuah dokumen atau laporan, melainkan harus didapatkan dengan terjun kelapangan secara langsung. Jenis data yang didapatkan dari teknik observasi ini dapat berupa gambaran mengenai sikap, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi yang akan menjadi tempat penelitian. Teknik ini sangat berguna bagi peneliti untuk memnentukan siapa yang nantinya akan diwawancarai. (Raco, 2010)

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini berfokus pada pengumpulan data melalui dokumen yang berupa teks (catatan), rekaman audio maupun audio visual, gambar, buku, majalah, dan sebgainya. (Nursapiah, 2020: 81)

Dokumentasi ini nantinya akan berupa foto-foto, gambar atau kebijakan yang berhubungan dengan kondisi daerah. Teknik ini sangat dibutuhkan oleh peneliti, dengan peneliti mendapatkan sebuah informasi yang nantinya akan disimpulkan, peneliti juga perlu memperkuat data tersebut dengan cara melakukan beberapa dokumentasi, mulai dari dokumen sampai gambar yang berhubungan dengan penelitian.dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa dokumen pendukung keaslian skripsi ini, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Jepara, serta data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara.

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan sebuah tahapan metode untuk mengolah data yang diperoleh dari beberpa sumber sehingga menjadi sebuah informasi. Miles dan Huberman dalam bukunya (Sugiyono, 2010: 244) menyebutkan beberapa aktivitas dari analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data memiliki fokus kegiatan dalam hal memilih hal-hal penting dari data, semakin lama peneliti melakukan penelitian akan semkin banyak juga data yang diperoleh, sehingga diperlukanlah tahapan ini. Dengan banyaknya data yang diperoleh, serta kompleksnya data tersebut, reduksi data ini sangat berguna bagi peneliti untuk memfokuskan kepada data-data yang diperlukan saja. Oleh karenan itu reduksi data ini sangat bermanfaat bagi peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah langkah untuk menyajikan data secara uraian singkat. Dengan menyajikan data akan mempermudah dalam memahami fenomena apa yang terjadi, serta memudahkan dalam menentukan langkah apa yang diambil kedepan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua teknik analisis siatas dilakukan maka diperlukanlah satu tahapan lagi yaitu penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini sangat memudahkan pembaca dalam melihat hasil dari penelitian.

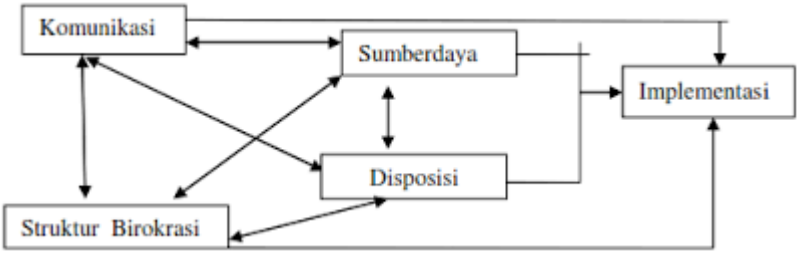
BAB II

KERANGKA TEORI

Penelitian ini memiliki fokus pada pengembangan daerah wisata dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan daerah, serta implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018-2033. Peneliti akan menngunakan, teori implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara khusus dan langsung ditujukan kepada masyarakat pengelola obyek wisata. Teori Implementasi George Edward III dijelaskan sebagai berikut:

A. Teori implementasi

Terori implementasi George Edward III



Gambar 1 teori implementasi george edward III

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, banyak bagian bagian yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi implementasi. Adapun faktor-faktor yang saling berhubungan adalah, (Nugroho, 2014: 264) pertama komunikasi, merupakan upaya dalam bagaimana sebuah kebijakan di komunikasikan dengan masyarakat atau publik, untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Seorang pelaku kebijakan harus bertanggung jawab

kepada implmenetasi kebijakan dengan mengetahui langkah apa yang harus di tempuh agar proses penyampaian kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi kebijakan menacakup tiga faktor meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi

a. Transmisi

   Tranmisi menghendaki supaya kebijakan publik disampaikan kepada semua elemen yang bersangkutan tidak hanya terbatas dengan para pelaksan kebijakan, akan tetapi juga disampaikan kepada sasaran kebijakan atau pihak lain yang berkepentingan dalam kebijakan ini. Transmisi adalah faktor yang berpengaruh dalam komunikasi kebijakan dengan menyalurkan kebijakan dengan baik akan berdampak pada suatu implementasi yang baik, seringnya miskomunikasi dalam penyampaian kebijakan dikarenakan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui oleh proses komunikasi kebijakan, sehingga apa yang diharapkan terkendala di tengah jalan, para pelaksan kebijakan harus menyadari realita bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, kebijakan diciptakan dan suatu perintah melaksanakannya bukan hanya sekedar melaksanakannya, banyak ditemukan bahwasannya keputusan-keputusan yang dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan seringkali terjadi sebuah kesalahpahaman kepada kebijakan-kebijakan yang telah diciptakan dan diundangkan.

b. Kejelasan

   Kejelasan merupakan salah faktor yang cukup penting dalam kominikasi, komunikasi tidak hanya disampaikan kepada seluruh elemen yang bersangkutan dang yang berkepentingan dengan kebijakan juga harus disampaikan secara jelas, ketidakjelasan

sebuah informasi yang disampaikan akan membuat pesan dari informasi tersebut akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah, juga dapat berpotensi bertentangan dengan pesan awal yang disampaikan

c. Konsistensi

   Konsistensi merupakan faktor yang berpengaruh dalam kelancaran kominikasi kebijakan, implementasi kebijakan jika ingin berjalan efektif maka perintah yang dikeluarkan harus konsisten dan jelas.

Kedua sumber daya, menyangkut kepada ketersidiannya sumberdaya manusia dengan kapabilitas melaksanakan kebijakan dengan efektif. Sumberdaya manusia menjadi fokus yang penting dikarenakan untuk melaksanakan kebijakan dibutuhkan orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sesuai dapat dipertanggung jawabkan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan semestinya. Adapaun terdapat indicator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumberdaya manusia mempengaruhi kebijakan dalam implementasinya, fator factor tersebut adalah,

a. Sumber daya manusia yag utama dalam implementasi kebijakan adalah pegawai atau staf dalam bidangnya
b. Para pelaksana kebijakan harus diberi arahan serta informasi dikarenakan informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan
c. Wewenang agar sebuah perintah dapat dilaksanakan dengan baik, maka dari itu wewenang dalam implementasi kebijakan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan efektif
d. Fasilitas fisik atau non fisik dapat berupa sarana dan prasarana

Ketiga disposisi, disposisi adalah hal dalam kesediaan aktor atau implementor untuk melakukan implementasi kebijakan, disposisi berisikan tentang komitmen, kompetensi dan kapabilitas. Apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif maka besar kemungkinan proses implementasi akan berjalan dengan efektif. Demikian juga sebaliknya jika para pelaku implementasi kebijakan memiliki sikap yang negative maka implementasi kebijakan dapat terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan para pelaku implementasi kebijkan akan mendapatkan masalah atau kendala dalam proses pengimplementasiannya. Terdapat beberapa faktor mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

Keempat struktur birokrasi. Adalah dalam hal tantangan agar tidak muncul fragmantasi birokrasi yang berujung menurunkan efektivitas dari sebuah kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Dalam struktur birokrasi terdapat standard operating procedure dan fragmentasi

a. Standard Operating Procedure

   Sop merupakan suatu ukuran dasar dalam prosedur kerja. Yang dilakukan secara rutin oleh para pelaku kebijakan berdasarkan standar yang telah di tetapkan. Sop dapat berguna dalam penyeragaman langkah – langkah yang akan di ambil oleh para pelaku kebijakan

b. Fragmentasi

   Merupakan pembagian tanggung jawab, aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan dalam beberapa unit kerja sehingga diperlukannya komunikasi serta koordinasi yang baik. Pada dasarnya koordinasi yang diperlukan semakin besar untuk dapat terlaksananya kebijakan maka semakin kecil

kemungkinan berhasil kebijakannya. Fragmentasi dapat menyebabkan suatu konsekuensi pokok yang merugikan.

Berdasarkan beberapa pemaparan beberapa teori mengenai kebijakan tersebut, pada penelitian kali ini peneliti akan menganalisis Implementasi kebijakan Perda anaomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara dengan menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George C, Edward III, model ini memliki variable yang mudah dipahami, dikarenakan cukup sederhana dan sudah sering dipakai oleh peniliti terdahulu, serta dapat digunakan sebagai alat menganalisis implementasi kebijakan di berbagai tempat

BAB III

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI JEPARA

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

1. Profil Geografis

Kabupaten Jepara adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian paling utara dari provinsi tersebut. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48.02" sampai 110° 58' 37.40" bujur timur dan 5° 43 20.67" sampai 6° 47' 25.83" lintang Selatan. Posisi geografis ini menjadikan Jepara sebagai kawasan yang strategis karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara dan memiliki potensi sumber daya kelautan serta pariwisata bahari yang sangat kaya. Ibu kota kabupaten terletak di Jepara, berjarak sekitar 71 kilometer dari Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi. Perjalanan ke Semarang dari Jepara dapat ditempuh dalam waktu lebih dari dua jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan moda transportasi yang digunakan. Wilayah Kabupaten Jepara memiliki luas daratan sekitar 1.004,132 km² dengan garis pantai sepanjang 82 km. Selain daratan, Jepara juga memiliki wilayah laut seluas 1.845,6 km², yang mencakup 27 pulau, dimana 5 pulau di antaranya berpenghuni, sedangkan 22 pulau lainnya tidak berpenghuni. Kepulauan Karimunjawa adalah gugusan pulau paling terkenal dari wilayah ini dan menjadi destinasi wisata bahari unggulan yang diakui secara nasional maupun internasional. Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi sekitar 71 kilometer dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih dari 2 jam. Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km2 dengan panjang garis pantai 82 km. Selain itu juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km2. Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 27 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni, dan 22 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut

Secara administratif, wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi menjadi 195 desa atau kelurahan, terdiri dari 184 desa dan 11 kelurahan. Satu

kecamatan terpisah dengan Pulau Jawa yaitu Pulau Karimunjawa. Menurut klasifikasinya, baik kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk swasembad.

Kabupaten Jepara, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis yang unik dan beragam, menjadikannya daerah dengan potensi alam yang menarik, khususnya dalam sektor kepariwisataan. Keunikan ini salah satunya terletak pada fakta bahwa wilayah Kabupaten Jepara tidak hanya meliputi daratan utama di Pulau Jawa, tetapi juga Kepulauan Karimunjawa yang memukau, terhampar di Laut Jawa. Aksesibilitas menuju gugusan pulau eksotis ini semakin mudah berkat adanya layanan kapal feri yang beroperasi secara reguler dari pelabuhan Jepara. Selain itu, bagi wisatawan yang menginginkan perjalanan lebih cepat, tersedia pula layanan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Penting juga dicatat bahwa di Kepulauan Karimunjawa sendiri terdapat fasilitas lapangan terbang, yang tentunya semakin mendukung konektivitas dan pengembangan pariwisata di sana.

Meskipun memiliki wilayah kepulauan, daratan utama Jepara juga menunjukkan variasi luasan yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Kalinyamatan tercatat sebagai wilayah tersempit dengan luas hanya sekitar 2.371,001 hektar, menunjukkan kepadatan aktivitas dan pemukiman di areanya. Sebaliknya, Kecamatan Keling tampil sebagai kecamatan terluas, membentang hingga 12.311,588 hektar. Luasan ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Keling memiliki cakupan wilayah yang didominasi oleh lahan yang mungkin masih alami atau belum tergarap sepenuhnya, berpotensi untuk pengembangan lebih lanjut.

Secara umum, mayoritas luas wilayah Kabupaten Jepara didominasi oleh tanah kering, mencakup sekitar 74.122,133 hektar atau 78,82% dari total luas wilayah. Proporsi ini menunjukkan karakteristik lahan yang cocok untuk berbagai jenis budidaya non-sawah atau bahkan peruntukan hutan dan perkebunan. Sementara itu, sisa luasan wilayah, yakni sebesar 26.291,056 hektar atau 26,28%, merupakan tanah sawah, yang mendukung sektor pertanian pangan di kabupaten ini. Sebagai contoh, Kecamatan Keling yang merupakan kecamatan terluas, memiliki komposisi lahan yang sangat timpang antara tanah kering dan tanah sawah; di sana, tanah kering membentang

seluas 10.041,464 hektar, sementara tanah sawah hanya 2.270,124 hektar. Kontras dengan Keling, Kecamatan Kalinyamatan yang merupakan yang terkecil, menunjukkan komposisi lahan yang lebih berimbang meskipun luasan totalnya minim, dengan 1.391,357 hektar tanah sawah dan 978.644 hektar tanah kering.

Dari segi topografi, Kabupaten Jepara menawarkan lanskap yang sangat bervariasi dan menarik. Wilayahnya dapat secara jelas dibagi menjadi empat karakteristik utama. Pertama, wilayah pantai yang membentang di pesisir barat dan utara, menciptakan garis pantai yang panjang dengan potensi pariwisata bahari. Kedua, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah dan selatan, merupakan area yang subur dan cocok untuk pertanian serta permukiman. Ketiga, wilayah pegunungan yang berada di bagian timur, merupakan lereng barat dari Gunung Muria, menyajikan pemandangan alam yang menawan dan berpotensi untuk agrowisata atau ekowisata. Terakhir, dan tak kalah penting, adalah wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara, yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah destinasi wisata bahari unggulan.

Kondisi topografi yang demikian beragam ini secara langsung memengaruhi variasi ketinggian di Kabupaten Jepara, mulai dari 0 meter hingga mencapai 1.301 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah pantai yang terendah dapat ditemukan di Kecamatan Kedung, dengan ketinggian antara 0-2 meter dpl, yang merupakan dataran pantai yang datar dan landai. Sebaliknya, daerah tertinggi berada di Kecamatan Keling, dengan ketinggian yang bervariasi dari 0 hingga 1.301 meter dpl, yang didominasi oleh topografi perbukitan dan pegunungan. Variasi ketinggian yang signifikan ini kemudian membagi Kabupaten Jepara menjadi empat kategori kemiringan lahan yang berbeda. Sebanyak 41.327,060 hektar lahan dikategorikan datar, menunjukkan potensi untuk pengembangan permukiman atau pertanian intensif. Kemudian, 37.689,917 hektar lahan berstatus bergelombang, yang mungkin cocok untuk perkebunan atau penggunaan lahan yang memerlukan adaptasi kontur. Sisanya, 10.776 hektar merupakan lahan curam dan 10.620,212 hektar merupakan lahan sangat curam, menunjukkan wilayah-wilayah yang memerlukan pengelolaan khusus, mungkin untuk konservasi atau ekowisata tertentu yang memanfaatkan topografi ekstrem. Gambaran

geografis yang komprehensif ini menjadi fondasi penting dalam memahami potensi pembangunan di Kabupaten Jepara, terutama dalam merancang dan mengimplementasikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang harus mempertimbangkan karakteristik unik setiap wilayahnya. Berikut daftar topografi desa berdasarkan setiap kecamatan di Kabupaten Jepara:

Topografi Desa / Village Topography					
Jumlah		Lembah/ DAS	Lereng punggung bukit	Dataran	Pantai
Kecamatan	Desa				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kedung	18	-	-	12	6
2. Pecangaan	12	-	-	12	-
3. Kalinyamatan	12	-	-	12	-
4. Welahan	15	-	-	15	-
5. Mayong	18	-	4	14	-
6. Nalumsari	15	-	1	14	-
7. Batealit	11	-	2	9	-
8. Tahunan	15	-	-	12	3
9. Jepara	16	-	-	8	8
10. Mlonggo	8	-	-	3	5
11. Pakis Aji	8	-	2	6	-
12. Bangsri	12	2	3	6	1
13. Kembang	11	-	5	4	2

14. Keling	12	-	3	8	1
15. Donorojo	8	-	2	2	4
16. Karimunjawa	4	-	-	-	4
Jepara	195	2	22	137	34

Tabel 1 topografi desa

Dengan kondisi topografi yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Jepara memperlihatkan variasi ketinggian yang signifikan, membentang dari 0 hingga 1.301 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian ekstrem ini menciptakan bentang alam yang beragam dan memenharuhi karakteristik geologis serta iklim mikro di seluruh wilayah. Secara spesifik, daerah terendah Kabupaten Jepara adalah Kecamatan Kedung, yang terletak di antara 0 hingga 2 mdpl, merupakan dataran Pantai yang landai dan rentan terhadap pengaruh pasang surut air laut. Sebaliknya, daerah tertinggi ditemukan di Kecamatan Keling, dengan rentan ketinggian yang luas antara 0 hingga 1.301 mdpl, didominasi oleh perbukitan yang menjulang tinggi, menawarkan pemandangan alam yang berbeda dan potensi ekowisata.

Variasi topografi ini berimplikasi langsung pada persebaran jenis tanah di Kabupaten Jepara. Pada bagian daratan, terdapat lima jenis tanah utama yang tersebar dengan karakteristik dan dominasi yang berbeda. Tanah Andosol coklat ditemukan di bagian perbukitan utara dan puncak Gunung Muria, mencakup 3,15% dari total area. Jenis tanah ini umumnya subur dan cocok untuk pertanian sayuran atau perkebunan. Selanjutnya, tanah Regosol tersebar di bagian utara Kabupaten Jepara dengan persentase 2,69%, seringkali ditemukan di daerah pantai atau lereng gunung berapi. Tanah Alluvial mendominasi di sepanjang pantai utara, dengan persentase 9,09%. Tanah ini terbentuk dari endapan sungai dan sangat cocok untuk pertanian sawah atau budidaya perikanan darat. Selain itu, tanah Asosiasi Mediterian menempati pantai barat dengan persentase 19,32%, menunjukkan karakteristik lahan yang unik, seringkali cocok untuk perkebunan. Namun, jenis tanah yang paling mendominasi dan memiliki cakupan terluas di Kabupaten Jepara adalah tanah Latosol, yang berada di perbukitan Gunung Muria dengan persentase mencapai 65,39%. Tanah Latosol, yang terbentuk dari pelapukan

batuan vulkanik, dikenal memiliki kesuburan yang baik, terutama untuk tanaman tahunan seperti perkebunan.

Sebagai kota-kota lain di sepanjang Pantai Utara Jawa, Kabupaten Jepara memiliki iklim tropis yang ditandai dengan dua musim yang bergantian sepanjang tahun: musim penghujan dan musim kemarau. Suhu atau temperatur rata-rata di Kabupaten Jepara relatif stabil setiap bulan, berkisar antara 26,40°C hingga 28°C. Data tahun 2023 menunjukkan pola hujan yang khas. Rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, mencapai 24 hari hujan, yang mengindikasikan puncak musim penghujan. Sebaliknya, hari hujan terendah tercatat pada bulan Juli, dengan hanya 2 hari hujan, menandai puncak musim kemarau. Pola ini juga tercermin pada curah hujan. Curah hujan tertinggi mencapai 503,00 mm pada bulan Januari, sementara curah hujan terendah hanya 32,00 mm pada bulan Agustus. Kondisi iklim ini, bersama dengan karakteristik topografi dan jenis tanah, menjadi faktor fundamental yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan pembangunan di Kabupaten Jepara, termasuk dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah agar sesuai dengan kondisi alam dan potensi wilayah.

2. Profil Demografi

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2023, jumlah penduduk Kabupaten Jepara sebanyak 1.264.600 jiwa yang meliputi jumlah perempuan sebanyak 588821 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 596126 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Kabupaten Jepara menempati peringkat 13untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Kedung	82,6	-	6,53	1807	101,4
2	Pecangaan	90,1	-	7,13	2431	100,8
3	Kalinyamatan	65,6	-	5,19	2621	101,3

4	Welahan	81,7	-	6,46	2796	101,7
5	Mayong	97,5	-	7,71	1381	100,6
6	Nalumsari	81,6	-	6,46	1477	100,3
7	Batealit	90,6	-	7,16	941	101,3
8	Tahunan	115,7	-	9,15	2710	102,5
9	Jepara	85,2	-	6,73	3148	100,8
10	Mlonggo	89,2	-	7,05	1877	103,3
11	Pakis Aji	63,9	-	5,05	980	102,5
12	Bangsri	105,5	-	8,35	1162	101,1
13	Kembang	74,3	-	5,88	626	99,4
14	Keling	68	-	5,38	562	99,6
15	Donorojo	62,4	-	4,93	615	100,3
16	Karimunjawa	10,6	-	0,84	228	104,5
17	Jepara	1264,6	-	100	1240	101,2

Tabel 2 profil demografi

Seperti yang terlihat dalam tabel diatas, jumlah penduduk di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 mencapai 1.223.198 jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 1.423% atau sebanyak 17.402 jiwa ditahun 2018 sehingga menjadi 1.240.600 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan kembali sebesar 1.377% atau sama dengan 17.312 jiwa sehingga mencapai 1.257.912 jiwa.

Apabila diperinci disetiap kecamatan, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2019 berada berada di Kecamatan Tahunan yaitu sebanyak 120.495 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Karimunjawa yaitu sebanyak 9.784 jiwa. Berikut daftar lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk disetiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara pada tahun 2019.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km^2
1.	Kedung	81.176	1.696
2.	Pecangaan	88.759	2.298
3.	Kalinyamatan	67.520	2.592
4.	Welahan	78.077	2.566
5.	Mayong	94.309	1.373
6.	Nalumsari	77.361	1.343
7.	Batealit	89.803	896
8.	Tahunan	120.495	2.707
9.	Jepara	92.967	3.301
10.	Mlonggo	90.262	1.823
11.	Pakis Aji	63.535	935
12.	Bangsri	106.925	1.130
13.	Kembang	73.153	596
14.	Keling	65.147	559
15.	Donorojo	58.633	557
16.	Karimunjawa	9.784	202
Jumlah		1.257.912	1.201

Tabel 3 jumlah penduduk dan kepadatan penduduk

3. Sejarah Pariwisata Di Jepara

Kabupaten Jepara, yang berlokasi strategis di Provinsi Jawa Tengah, memancarkan daya Tarik pariwisata yang luar biasa. Potensi ini didorong oleh perpaduan harmonis antara

kekayaan alamnya yang memukau, budaya yang kental, dan Sejarah Panjang yang terukir dalam setiap sudut wilayahnya, menawarkan beragam destinasi wisata yang siap dijelajahi. Jepara telah lama dikenal sebagai tempat kelahiran seni ukir kayu yang mendunia, sebuah warisan budaya yang tak hanya memperkaya nilai estetika, tetapi juga menjadi daya Tarik unik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan langsung keahlian para seniman local. Selain warisan budaya, Jepara juga diberkahi dengan Pantai-pantai yang mempesona, menjadikannya salah satu destinasi wisata yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Hingga saat ini, wisata Pantai di Jepara masih menjadi daya Tarik utama bagi Masyarakat umum, khususnya dari wilayah Jawa Tengah. Posisi geografis Kabupaten Jepara yang berada di pesisir utara Pulau Jawa secara alami memberinya keuntungan berupa kekayaan wisata bahari yang melimpah. Mulai dari deretan pantai yang indah hingga gugusan pulau-pulau eksotis, potensi bahari Jepara sangat tinggi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga regional Jawa Tengah.

Namun, daya tarik pariwisata Jepara tidak terbatas pada keindahan baharinya saja. Kabupaten ini juga menawarkan ragam wisata lain yang tak kalah menarik, meliputi wisata alam, sejarah, hingga religi. Destinasi wisata alamnya menyajikan panorama pegunungan dan hutan yang asri, cocok untuk kegiatan trekking atau menikmati keheningan alam. Sementara itu, jejak sejarah yang kuat, termasuk peninggalan era perjuangan dan kerajaan, dapat ditemukan di berbagai situs bersejarah yang menawarkan pengalaman edukatif. Tak ketinggalan, wisata religi juga menjadi bagian penting, dengan adanya makam tokoh-tokoh penting dan tempat-tempat ibadah yang menjadi tujuan ziarah. Beragamnya pilihan ini menjadikan Kabupaten Jepara destinasi yang komprehensif, mampu memenuhi minat dan preferensi berbagai jenis wisatawan. Berikut adalah daftar objek wisata yang bisa ditemukan di Kabupaten Jepara, yang menegaskan posisi strategisnya dalam peta pariwisata Jawa Tengah dan Indonesia. Berikut daftar obyek wisata di kabupaten Jepara:

No	Kecamatan	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Religi	Wisata Sejarah	Jumlah
1	Kedung	1	-	-	-	1
2	Pecangaan	1	1	-	-	2
3	Kalinyamatan	-	1	-	-	1
4	Welahan	-		1	1	2
5	Mayong	-	1	-	1	2
6	Nalumsari	1	-	-	-	1
7	Batealit	2	1	-	-	3
8	Tahunan	3	1	1	1	6
9	Jepara	4	5	-	3	12
10	Monggo	6	2	-	1	9
11	Pakis Aji	3	1	-	-	4
12	Bangsri	3	1	-	-	4
13	Kembang	3	1	-	-	4
14	Keling	3	-	-	-	3
15	Donorojo	3	-	-	1	4
16	Karimunjawa	1	-	-	-	1
Jumlah		34	15	2	8	59

Tabel 4 Jumlah Obyek Wisata menurut Klasifikasi di Kabupaten Jepara, 2024

Terdapat 34 wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan membuat Kabupaten Jepara memiliki potensi alam yang luar biasa. Jika dikembangkan dan dikelola dengan strategi yang tepat, destinasi-destinasi ini mampu menjadi magnet kuat bagi para pelancong. Selain wisata alam, Kabupaten Jepara juga memiliki beragam jenis objek wisata lainnya, sehingga secara keseluruhan, terdapat 59 objek wisata yang dapat dinikmati. Destinasi-destinasi ini mencakup berbagai kategori menarik, mulai dari wisata buatan yang menawarkan pengalaman

unik, wisata religi yang kaya akan nilai spiritual, hingga wisata sejarah yang menguak kembali jejak-jejak masa lampau.

Keuntungan dari sumber daya alam dan warisan budaya yang melimpah ini menjadi aset tak ternilai bagi sektor pariwisata Jepara. Apabila potensi ini dapat dikelola secara optimal, niscaya akan mampu menarik jumlah wisatawan yang sangat besar, baik dari kalangan domestik maupun internasional. Lonjakan kunjungan wisatawan ini, pada gilirannya, akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Jepara. Dengan tersebarnya objek wisata di berbagai kecamatan, terbuka pula lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari pengelola destinasi, pemandu wisata, pedagang suvenir, hingga penyedia akomodasi dan kuliner. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong geliat ekonomi lokal secara menyeluruh, menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai daya tarik ini, berikut adalah daftar jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Jepara. Berikut daftar pengunjung obyek wisata di Kabupaten Jepara.

No	Obyek Wisata	Pengunjung		
		Wisman	Wisnus	Jumlah
1	Pantai Kartini	1.144	178.113	179.257
2	Pantai Bandengan	1.645	272.576	274.221
3	Pulau Panjang	110	27.828	27.938
4	Museum Kartini	122	26.625	26.747
5	JOP	106	24.525	24.631
6	Lomban	-	15.747	15.747
7	Pantai Pungkruk	5	15.483	15.488

8	Benteng Portugis	4	40.834	40.838
9	Goa Tritip	-	7.349	7.349
10	Pulau Mandalika	-	1.463	1.463
11	Lainnya	12.115	1.353.592	1.365.707
JUMLAH		15.251	1.964.135	1.979.386

Tabel 5 banyaknya wisatan yang berkunjung ke obyek wisata

Bisa dilihat dari daftar banyaknya pengunjung obyek wisata di kabupaten Jepara, wisata bahari masih menjadi tujuan utama para wisatawan, dengan obyek wisata Pantai Bandengan menjadi obyek wisata paling banyak dikunjungi dengan total 274.221 wisatawan. Daftar tersebut diatas merupakan obyek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabputen Jepara, masih banyak obyek wisata lainnya yang berjalan secara mandiri.

B. Perkembangan Sejarah Priwisata Kabupaten Jepara Masa Kolonial Belanda (Abad ke-19 - Awal Abad ke-20)

1. Perkembangan Seni dan Kerajinan (1970-an)

Memasuki tahun 1970-an, denyut kehidupan seni dan kerajinan di Kabupaten Jepara semakin terasa menggema di tengah masyarakat. Pada masa itu, geliat pertumbuhan industri kerajinan bukan hanya terlihat dari meningkatknya jumlah bengkel kerja atau sentra kerajinan kayu yang bermunculan diberbagai sudut desa, tetapi juga dari semangat Masyarakat yang perlahan mulai menaruh harapan hidup mereka pada kekuatan tangan dan kreativitas yang diwariskan secara turun-menurun. Kerajinan kayu, terutama ukiran, mulai berkembang pesat dan menjadi salah satu komoditas unggulan yang menggerakkan roda perekonomian lokal. Di banyak desa seperti Mulyoharjo, Senenan, dan Tahunan, terlihat aktivitas para

pengrajin yang bekerja dari pagi hingga senja. Mereka duduk bersila di lantai bambu rumah-rumah sederhana, memegang pahat dan palu kecil, dengan sepenuh hati memahat sepotong kayu jati menjadi karya seni bernilai tinggi. Pada periode ini, usaha kecil dan menengah mulai tumbuh subur. Rumah-rumah warga pun banyak yang beralih fungsi menjadi bengkel kerja—tempat di mana seni dan ekonomi berpadu. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari usaha ini, menciptakan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam proses produksi.

Kerajinan kayu bukan lagi sekadar hasil keterampilan tangan, tetapi telah menjadi identitas budaya. Ukiran khas Jepara yang rumit dan penuh detail menjadi ciri khas yang membedakan produk Jepara dengan daerah lain. Bahkan, nama Jepara mulai berkibar sebagai pusat produksi furnitur ukiran kayu dengan kualitas terbaik di Indonesia, sebuah pengakuan yang lahir dari kerja keras dan dedikasi para pengrajin lokal.

Dengan meningkatnya permintaan pasar, terutama dari luar negeri, para pengrajin mulai berpikir lebih maju. Mereka tidak hanya fokus pada keterampilan tradisional, tetapi juga mulai membuka diri terhadap pembaruan teknologi. Mesin-mesin modern mulai diperkenalkan ke dalam proses produksi—dari mesin bubut hingga mesin ukir otomatis—yang secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kerja. Namun demikian, sentuhan tangan tetap menjadi ruh dari setiap karya; kehalusan goresan ukir yang khas tetap menjadi keunggulan utama yang tak dapat tergantikan oleh mesin.

Pemerintah daerah pun turut ambil bagian dalam mendukung geliat industri ini. Berbagai pelatihan diberikan kepada para pengrajin, mulai dari teknik produksi, pengemasan, hingga strategi pemasaran. Pendidikan keterampilan menjadi salah satu fokus penting, agar para pengrajin tidak hanya mampu berkarya tetapi juga memiliki daya saing di pasar global. Sentra-sentra pelatihan dibuka, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan serta pihak swasta mulai digalakkan. Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, industri kerajinan kayu pada masa itu juga menjadi daya tarik budaya. Wisatawan yang datang ke Jepara tidak hanya ingin membeli produk furnitur, tetapi juga ingin menyaksikan secara langsung proses kreatif di baliknya—

bagaimana sebilah kayu jati dipahat menjadi lemari, meja, atau pintu ukir yang bernilai seni tinggi. Dalam setiap bengkel kerja, tersimpan kisah panjang tentang ketekunan, warisan budaya, dan cinta pada tanah kelahiran.

Dengan semua ini, industri kerajinan kayu Jepara menjelma menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah, sekaligus penjaga identitas budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Spirit kemandirian, kerja keras, dan inovasi menjadi fondasi yang mengantarkan Jepara ke panggung nasional dan internasional sebagai kota ukir yang tak tergantikan. Pemerintah Kabupaten Jepara. (2023).

Industri kerajinan kayu pada 1970-an tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan yang tertarik pada seni dan budaya. Showroom dan bengkel kerajinan di desa-desa seperti Tahunan dan Mulyoharjo mulai ramai dikunjungi oleh pedagang furnitur dari kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, yang juga membawa keluarga mereka untuk melihat langsung proses pembuatan ukiran. Kunjungan ini secara tidak langsung mempromosikan Jepara sebagai destinasi wisata berbasis kerajinan, yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung untuk melihat keterampilan pengrajin secara langsung.

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan asosiasi pengrajin, mulai mengadakan pameran furnitur tahunan untuk menarik pembeli dan wisatawan. Pameran ini tidak hanya memamerkan produk jadi, tetapi juga menampilkan demonstrasi langsung teknik mengukir, yang menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan, baik domestik maupun asing, mulai mengenal Jepara sebagai "kota ukir," sebuah julukan yang kini melekat erat. Kegiatan ini turut mendorong pengembangan homestay sederhana yang dikelola oleh masyarakat lokal untuk mengakomodasi pengunjung, menandai awal mula pariwisata berbasis komunitas di Jepara.

Kerajinan kayu juga memengaruhi perkembangan seni lain, seperti pembuatan replika kapal tradisional dan ornamen rumah khas Jawa. Beberapa pengrajin mulai memproduksi suvenir berukuran kecil, seperti miniatur furnitur atau kotak ukir, yang menjadi oleh-oleh populer bagi wisatawan. Kehadiran wisatawan ini

mendorong masyarakat lokal untuk lebih kreatif dalam memasarkan produk mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian seni ukir sebagai bagian dari identitas budaya Jepara. Pameran dan kunjungan wisatawan ini menjadi cikal bakal pengembangan pariwisata budaya yang lebih terorganisasi pada dekade berikutnya.

2. Pariwisata Alam dan Perkembangan Infrastruktur (1970-an hingga 1990-an)

Sejak tahun 1970-an, geliat pariwisata di Kabupaten Jepara mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tidak lagi sekadar daerah pesisir yang tenang dengan aktivitas utama pertanian dan kerajianan, jepara perlahan bertransformasi menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di pesisir utara Jawa Tengah. Perubahan ini tentu tidak terlepas dari Pembangunan infrastruktur yang mulai dilakukan secara bertahap dan menyeluruh berbagai sektor strategis, terutama aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 1995).

Pembangunan jalan-jalan utama penghubung antar kecamatan dan desa mempermudah arus lalu lintas, tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi wisatawan dari luar daerah yang ingin mengeksplorasi kekayaan alam Jepara. Jalan menuju objek wisata seperti Pantai Bandengan dan Pantai Kartini mulai diaspal dan diperlebar, menciptakan kenyamanan bagi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Tak hanya itu, dermaga dan pelabuhan di pusat kota Jepara mulai ditingkatkan kapasitasnya sebagai pintu masuk ke Kepulauan Karimunjawa, sebuah gugusan pulau eksotis yang selama ini tersembunyi dari gemerlap pariwisata nasional (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023). Pantai Kartini menjadi ikon wisata pantai yang pertama kali diperkenalkan kepada khalayak luas. Dengan pemandangan laut yang terbuka, ombak yang tenang, serta dermaga yang menjorok ke laut, pantai ini tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga nilai historis. Dinamai berdasarkan tokoh emansipasi perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, pantai ini menjadi tempat yang menyimpan semangat perjuangan dan cita-cita akan kemajuan masyarakat Jepara, khususnya dalam pendidikan dan

kebudayaan (Astuti, 2009). Sementara itu, kemasyhuran Kepulauan Karimunjawa mulai menanjak sejak akhir 1980-an.

Para peneliti kelautan dan pecinta ekowisata mulai mengenal dan memperkenalkan kekayaan alam bawah laut Karimunjawa yang begitu memesona. Terumbu karang yang masih alami, berbagai spesies ikan tropis, dan pasir putih yang halus menjadi aset luar biasa yang jarang ditemukan di tempat lain (Wibowo, 2015). Aktivitas wisata seperti snorkeling, diving, dan island hopping mulai berkembang di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Meskipun fasilitas pada masa itu masih tergolong terbatas, namun semangat warga lokal untuk melayani tamu dengan keramahan membuat pengalaman wisata di Karimunjawa menjadi tak terlupakan (Nugroho, 2004).

Pemerintah Kabupaten Jepara mulai melihat potensi luar biasa ini dan melakukan intervensi yang tepat sasaran. Salah satunya dengan mulai menyusun rencana tata ruang pariwisata dan membangun fasilitas dasar seperti penginapan sederhana, pusat informasi wisata, hingga memfasilitasi pelatihan bagi warga sekitar untuk menjadi pemandu wisata (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023). Jepara tidak hanya menjual keindahan alamnya, tetapi juga budaya lokal yang khas—seperti tari-tarian tradisional, kerajinan tangan, hingga kuliner khas pesisir yang mulai disuguhkan dalam paket wisata (Soemarno, 2003).

Periode antara tahun 1970 hingga 1990 dapat dikatakan sebagai masa fondasi dalam pembangunan sektor pariwisata di Jepara. Pada 1990-an, pemerintah mulai memperkenalkan paket wisata terorganisasi ke Karimunjawa, bekerja sama dengan agen perjalanan dari Semarang dan Surabaya. Paket ini mencakup transportasi, akomodasi, dan tur keliling pulau, yang membuat Karimunjawa lebih mudah diakses oleh wisatawan kelas menengah. Promosi melalui media cetak, seperti brosur dan majalah pariwisata, turut meningkatkan popularitas Karimunjawa sebagai destinasi eksotis di Jawa Tengah. Periode ini menjadi titik balik bagi pariwisata Jepara, yang mulai beralih dari wisata lokal berbasis pantai menuju destinasi bahari dengan daya tarik internasional. Meski belum semasif

masa kini, geliat ekonomi mulai terlihat. Banyak warga yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil laut dan pertanian, kini membuka warung makan, menyewakan kamar untuk wisatawan, atau menjual oleh-oleh khas daerah seperti ikan asin, kerajinan kerang, dan batik Troso (BPS Jepara, 2023). Di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukanya daerah-daerah terpencil melalui akses jalan yang lebih baik membuat distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Hal ini juga membuka peluang baru bagi generasi muda Jepara untuk terlibat dalam sektor jasa, transportasi, dan pariwisata kreatif (Nugroho, 2004). Pariwisata alam, khususnya pantai dan laut, mulai membentuk identitas baru bagi Kabupaten Jepara. Jika sebelumnya daerah ini dikenal terutama sebagai kota ukir, maka sejak dekade 1980-an Jepara mulai dikenal sebagai gerbang menuju surga bahari di Laut Jawa. Perpaduan antara kekayaan budaya, keindahan alam, dan ketangguhan masyarakat lokal menjadi dasar kuat bagi kemajuan pariwisata Jepara yang terus berlanjut hingga era modern (Astuti, 2009; Wibowo, 2015).

3. Kebangkitan Pariwisata di Era Reformasi (2000-an hingga Sekarang)

Setelah era reformasi pada tahun 1998, wajah pariwisata Kabupaten Jepara mulai berubah secara signifikan. Terbukanya ruang-ruang partisipasi publik, meningkatknya otonomi daerah serta tumbuhnya kesadaran Masyarakat terhadap potensi lokal, menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Jepara mulai menaruh harapan perhatian yang lebih serius pada sektor ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, di luar sektor kerajinan dan perikanan sebelumnya mendominasi (Nugroho, 2022).

Salah satu Langkah awal yang dilakukan adalah penguatan infrastruktur dan promosi destinasi unggulan. Jalan-jalan menuju wisata strategis seperti Pantai Kartini, Pantai Bandengan, serta dermaga penyeberangan ke Karimunjawa mulai diperbaiki dan dilengkapi dengan fasilitasbpendukung. Pemerintah daerah juga mulai aktif mengikuti berbagai pemeran pariwisata Tingkat nasional dan internasional guna memperkenalkan Jepara sebagai destinasi yang tidak hanya

indah secara alamiah, tetapi juga kaya akan warisan budaya dan Sejarah (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023).

Kota Jepara pun mulai membangun identitasnya sebagai daerah wisata terpadu: memadukan keindahan alam, kejayaan sejarah, serta keluhuran budaya lokal. Wisata bahari tetap menjadi andalan. Karimunjawa, yang sebelumnya hanya dikenal oleh kalangan pecinta alam dan penyelam, kini berkembang menjadi kawasan wisata terpadu dengan berbagai pilihan akomodasi, paket tur, dan promosi digital yang menjangkau pasar global. Aktivitas seperti diving, snorkeling, mangrove tour, dan camping di pulau-pulau kecil menjadikan Karimunjawa sebagai "Bali kecil" di utara Jawa Tengah (Wibowo, 2015).

Namun, yang menarik adalah geliat pariwisata budaya dan religi yang mulai mendapat tempat sejajar. Dekade 2010-an menjadi momentum penting dalam pergeseran paradigma ini. Pemerintah dan masyarakat lokal mulai menyadari bahwa kekayaan sejarah Jepara tidak hanya terletak pada seni ukir atau warisan Kartini, tetapi juga pada peran pentingnya dalam sejarah Islam Jawa. Salah satu langkah strategis adalah pengembangan wisata religi berbasis ziarah ke situs-situs penting seperti Makam Sunan Nyamplungan dan terutama Makam Sunan Kalijaga, yang berada di wilayah pinggiran Jepara (Nugroho, 2022). Setiap tahunnya, ribuan peziarah datang tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyerap nilai-nilai sejarah dan spiritualitas dari tokoh besar Walisongo ini. Kegiatan keagamaan seperti haul akbar dan pengajian umum semakin dipadukan dengan kegiatan pariwisata yang berbasis komunitas. Penduduk sekitar turut mengambil peran sebagai pemandu ziarah, penyedia makanan khas, maupun pelaku ekonomi kreatif berbasis religi.

Di sini, wisata bukan hanya tentang destinasi, melainkan juga tentang narasi, tentang bagaimana kisah-kisah lama hidup kembali melalui pengalaman langsung yang menyentuh sisi spiritual para pengunjung (Astuti, 2009). Tak kalah penting, festival budaya juga menjadi magnet baru yang memperkuat identitas Jepara di mata wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satunya adalah Festival Tari Topeng Jepara, yang digelar secara rutin dan menjadi ruang ekspresi budaya lokal

yang penuh warna. Festival ini bukan hanya ajang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi perayaan atas kekayaan simbol, mitos, dan filosofi masyarakat pesisir utara Jawa. Masyarakat lokal mulai merasa bangga dengan tradisi mereka, dan pariwisata menjadi sarana untuk memperlihatkan keindahan budaya tersebut ke dunia luar (Nugroho, 2022; Soemarno, 2003). Festival-festival lain seperti Jepara Beach Festival, Karnaval Kartini, hingga event kuliner dan pameran kerajinan juga terus diselenggarakan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari berbagai kegiatan ini. Dari pelajar, seniman lokal, pengusaha mikro, hingga tokoh masyarakat, semuanya terlibat aktif dalam membangun citra Jepara yang ramah, kreatif, dan sarat makna budaya. Inilah bentuk nyata dari pariwisata yang berbasis masyarakat, di mana keuntungan ekonomi bukan hanya untuk investor besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga desa-desa wisata (BPS Jepara, 2023). Penting untuk dicatat bahwa dalam dua dekade terakhir, peran media sosial dan teknologi digital juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pariwisata di Jepara. Banyak destinasi wisata baru ditemukan dan dipromosikan oleh para travel vlogger, influencer, dan wisatawan mandiri. Citra positif Jepara sebagai kota ukir dan gerbang bahari kini dilengkapi dengan potret-potret eksotis dari air terjun tersembunyi, hutan mangrove, bukit cinta, hingga spot kuliner khas seperti horok-horok dan pindang serani (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023).

Secara umum, sektor pariwisata di Jepara telah mengalami transformasi luar biasa sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Dari hanya sebatas wisata pantai, kini berkembang menjadi jaringan ekosistem wisata yang holistik: melibatkan sejarah, budaya, religi, alam, dan teknologi. Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal, Jepara terus melangkah maju sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah.

4. Pariwisata Berkelanjutan dan Tantangan Masa Depan

Pada masa kini, pariwisata Jepara dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan keberlanjutan alam dan budaya lokal. Meskipun kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah sangat signifikan baik dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan usaha mikro dan kecil, hingga

penciptaan lapangan kerja, dampak negative terhadap lingkungan dan budaya lokal tidak dapat diabaikan begitu saja (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023). Salah satu tantangan terbesar yang kini Tengah dihadapi adalah permasalahan lingkungan. Jumlah wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama ke Kawasan pesisir dan pulau-pulau seperti karimunjawa, berdampak langsung terhadap kondisi ekosistem laut. Terumbu karang mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat aktivitas snorkeling dan diving yang kurang terkendali, serta pencemaran dari limbah kapal dan plastik sekali pakai yang terbawa arus laut. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa pengembangan pariwisata yang tidak terencana dapat menjadi boomerang bagi kelestarian alam (Wibowo, 2015). Tak hanya lingkungan, kebudayaan lokal pun mulai mengalami tekanan akibat arus modernisasi yang dibawa oleh perkembangan sektor wisata. Beberapa praktik tradisional mulai bergeser maknanya, menjadi sekadar atraksi visual untuk menarik wisatawan, alih-alih dijaga sebagai warisan spiritual dan sosial yang hidup. Tantangan ini diperparah oleh gempuran budaya populer yang terkadang menggeser nilai-nilai lokal dari ruang-ruang publik dan pendidikan (Soemarno, 2003). Dalam konteks ini, penting adanya upaya pelestarian budaya yang bukan sekadar bersifat simbolik, melainkan benar-benar melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menafsirkan ulang tradisinya untuk generasi mendatang.

Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara mulai mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat. Program-program seperti desa wisata berbasis ekowisata, pelatihan sadar wisata, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas telah diluncurkan untuk menciptakan ekosistem wisata yang lebih ramah lingkungan dan inklusif (BPS Jepara, 2023). Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam gerakan pelestarian melalui komunitas digital, kampanye lingkungan, dan festival edukatif semakin memperkuat semangat bersama untuk menjaga bumi Jepara tetap lestari.

Upaya memperluas jaringan promosi internasional juga terus digalakkan. Pemerintah daerah aktif menggandeng platform digital pariwisata, agen perjalanan

luar negeri, serta mengikuti berbagai expo internasional untuk memperkenalkan Jepara sebagai destinasi wisata yang tidak hanya eksotis secara visual, tetapi juga berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan (Nugroho, 2022). Strategi ini diharapkan dapat menarik wisatawan dengan kesadaran lingkungan tinggi, yang menghargai keaslian budaya dan kelestarian alam. Tak kalah penting adalah peningkatan kualitas layanan pariwisata. Pembangunan akomodasi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan hospitality, dan penataan destinasi agar inklusif dan aman bagi semua kalangan terus diupayakan. Pemerintah bersama stakeholder pariwisata juga mulai menerapkan prinsip carrying capacity untuk mengontrol jumlah kunjungan ke destinasi sensitif seperti pulau kecil dan kawasan konservasi laut. Dengan demikian, pengelolaan wisata diharapkan tidak hanya mengejar kuantitas kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman wisatawan dan kelestarian destinasi (Astuti, 2009). Ke depan, arah pembangunan pariwisata di Jepara tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kolaboratif. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal, akademisi, dan wisatawan harus berjalan beriringan dalam menciptakan pariwisata yang inklusif, lestari, dan berdaya saing tinggi. Seperti yang disampaikan dalam Visi Pembangunan Daerah Jepara 2021–2026, bahwa pembangunan sektor pariwisata harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan budaya sebagai warisan tak ternilai yang harus dijaga bersama (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023). Jika prinsip keberlanjutan ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, maka Jepara bukan hanya akan dikenal sebagai kota ukir dan kota wisata, tetapi juga sebagai contoh nyata daerah yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian warisan alam dan budayanya.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUK KEPARIWISATAAN DAERAH KABUTEN JEPARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 sebagai landasan strategis untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pariwisata, bertujuan menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan serta memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan ini menargetkan pengembangan 35 objek wisata yang terdiri dari pantai seperti Kartini dan Bandengan, kepulauan seperti Karimunjawa, serta wisata budaya dan religi seperti Museum Kartini dan makam Sunan Kalijaga, dengan visi menjadikan Jepara sebagai daerah tujuan wisata unggulan yang dinamis, kompetitif, dan berkelanjutan. Implementasi perda melibatkan berbagai inisiatif, mulai dari penyuluhan pengelola wisata, pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, hingga pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berperan sebagai koordinator utama, bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Meski berbagai program telah diluncurkan, tantangan seperti ketimpangan pengembangan destinasi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2018 dimulai dengan penyusunan rencana strategis yang mengidentifikasi potensi wisata dan merumuskan langkah pengembangan. Disparbud memetakan objek wisata resmi, mencakup wisata pulau seperti Pulau Panjang dan Mandalika, wisata sejarah seperti Benteng Portugis, wisata alam seperti air terjun Songgo Langit, dan wisata buatan seperti Jepara Ourland Park. Program penyuluhan diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pengelola, terutama di destinasi unggulan seperti Pantai Kartini, dengan materi meliputi *destination management* dan standar pelayanan wisata. Pemerintah juga mendirikan *Tourism Information Center* (TIC) Jepara di pusat kota, yang menyediakan informasi wisata melalui situs web *tic.jepara.go.id* dan pelayanan langsung. Namun, destinasi mandiri seperti desa wisata Troso, yang menonjolkan kerajinan tenun, dan Pantai Teluk Awur

sering kali tidak terjangkau oleh program ini akibat keterbatasan sumber daya dan jangkauan promosi (Zulianto & Prasetyoningsih, 2020). Upaya pemerintah untuk memperluas cakupan meliputi pelatihan teknologi bagi pengelola wisata mandiri dan kolaborasi dengan komunitas lokal.

Investasi menjadi pilar utama implementasi perda untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jepara. Proyek Aqua Edu Culture Park di Pulau Panjang, dengan nilai investasi Rp30 miliar, dirancang sebagai destinasi unggulan yang menggabungkan wisata alam dan edukasi. DPMTSP mengadakan penawaran investasi secara rutin, bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mempromosikan proyek ini kepada calon investor. Meski demikian, lemahnya koordinasi dengan Disparbud menyebabkan lambatnya realisasi investasi, dengan banyak investor masih ragu akibat kurangnya kepastian infrastruktur pendukung. Sistem *Online Single Submission* (OSS) diperkenalkan untuk mempermudah perizinan usaha pariwisata, tetapi penerapannya belum optimal, terutama bagi pelaku usaha mikro di desa wisata yang kurang familiar dengan teknologi digital (Hikmawan & Adhim, 2023). Pemerintah berupaya mengatasi hambatan ini dengan menyediakan pendampingan teknis dan memperluas akses informasi melalui TIC, meskipun tantangan tetap ada pada destinasi di kecamatan terpencil seperti Keling dan Donorojo.

Infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi Perda No. 6 Tahun 2018, dengan DPUPR bertugas membangun jalan akses, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya. Destinasi seperti Pantai Kartini dan Bandengan telah dilengkapi dengan *tourism center*, gedung serbaguna, area parkir, dan ruko untuk UMKM, yang meningkatkan kenyamanan wisatawan. Namun, wilayah seperti Gunung Muria, yang memiliki potensi wisata alam seperti Goa Tritip dan desa wisata Tempur, masih menghadapi keterbatasan akses jalan yang memadai. Anggaran APBD yang terbatas menyebabkan alokasi dana terkonsentrasi pada wilayah pesisir, seperti Kecamatan Jepara, Tahunan, dan Mlonggo, yang memiliki akomodasi seperti hotel, resor, dan homestay (Nida & Esariti, 2023). Konversi lahan pertanian akibat galian C di Kecamatan Nalumsari juga mengurangi daya tarik wisata pedesaan, karena lanskap alam terganggu (Taufiqurrohman et al., 2023). Pemerintah merespons dengan program rehabilitasi jalan dan pembangunan fasilitas dasar seperti toilet umum di destinasi prioritas, meskipun cakupannya belum merata.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi inti untuk memastikan keberlanjutan pariwisata sesuai visi perda. Disparbud mendorong pengelolaan swadaya oleh masyarakat, seperti di Pantai Bandengan dan desa wisata Troso, melalui pelatihan keterampilan, seperti pembuatan suvenir dan pengelolaan homestay. Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata membebaskan usaha mikro dari kewajiban pendaftaran, memungkinkan masyarakat mengelola wisata lokal dengan lebih fleksibel. Festival budaya, seperti Festival Lomban dan Tari Topeng, diselenggarakan secara rutin untuk memperkuat identitas wisata Jepara dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, destinasi yang tidak terdaftar sering kali menghadapi masalah seperti pungutan liar dan minimnya fasilitas, seperti tempat sampah dan penginapan, yang menurunkan minat wisatawan. Pemerintah berupaya mengatasi ini dengan menginventarisasi objek wisata baru dan memberikan insentif bagi pengelola yang mematuhi regulasi (Labib. 2022). Meski demikian, pemerataan pengembangan wisata tetap menjadi tantangan besar.

Promosi wisata menjadi fokus lain dalam implementasi perda, dengan TIC Jepara sebagai pusat informasi utama. Situs web TIC menyediakan panduan destinasi, paket wisata, dan informasi penginapan, sementara promosi offline dilakukan melalui pameran pariwisata dan kerja sama dengan agen perjalanan. Kebijakan retribusi fleksibel, seperti pembebasan tiket masuk di hari biasa berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. Namun, promosi digital belum menjangkau destinasi di wilayah terpencil, seperti Kecamatan Donorojo, yang memiliki potensi wisata religi dan alam. Kurangnya pemandu wisata yang menguasai bahasa asing juga menghambat daya tarik bagi wisatawan mancanegara, terutama di Karimunjawa. Pemerintah mulai melatih pemandu wisata lokal dan mengembangkan paket wisata terpadu untuk mengatasi kendala ini, meskipun efektivitasnya masih terbatas oleh keterbatasan anggaran dan SDM.

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu capaian penting implementasi Perda No. 6 Tahun 2018, dengan desa seperti Troso, Tempur, dan Petekeyan ditetapkan sebagai desa unggulan melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 55/179 Tahun 2018. Desa Troso menawarkan pengalaman wisata kerajinan tenun, sementara Tempur menggabungkan keindahan alam pegunungan Muria dengan situs sejarah seperti Candi Bubrah. Program

pelatihan pengelola desa wisata mencakup *digital marketing* dan pengelolaan homestay, bertujuan meningkatkan ekonomi lokal. Namun, desa wisata di wilayah terpencil sering kali kekurangan infrastruktur dasar, seperti jalan dan listrik, yang menghambat kunjungan wisatawan. Pemerintah berupaya memperluas jaringan listrik dan memperbaiki akses jalan, tetapi tantangan topografi di wilayah seperti Kecamatan Keling memperlambat kemajuan. Kolaborasi dengan sektor swasta untuk membangun akomodasi sederhana, seperti homestay, mulai diterapkan sebagai solusi jangka pendek.

Tantangan utama dalam implementasi perda adalah ketimpangan pengembangan antara destinasi unggulan dan mandiri. Wilayah pesisir seperti Kecamatan Jepara dan Mlonggo mendapat prioritas lebih besar, dengan akomodasi modern dan infrastruktur yang memadai, sementara wilayah seperti Gunung Muria dan Nalumsari tertinggal. Pungutan liar di destinasi yang tidak terdaftar mencerminkan lemahnya pengawasan, meskipun Perda No. 9 Tahun 2016 telah mengatur pendaftaran usaha pariwisata. Keterbatasan anggaran APBD juga menghambat pembangunan fasilitas di destinasi baru, seperti air terjun Songgo Langit atau Pantai Pailus. Pemerintah merespons dengan mengalokasikan dana tambahan untuk destinasi prioritas dan mengusulkan *lex specialis* untuk infrastruktur pariwisata, yang diharapkan meningkatkan alokasi dana secara sistematis. Meski berbagai inisiatif telah diluncurkan, pemerataan pengembangan, penguatan regulasi, dan koordinasi antarinstansi tetap menjadi fokus utama untuk memastikan keberhasilan Perda No. 6 Tahun 2018.

Menurut George III Implementasi Kebujakan dapat dipengaruhi oleh empat hal yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, keempat hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut penjelasannya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda Nomor 6 tahun2018, oleh sebab itu implementasi yang efektif serta efesien dapat terlaksana jika para pelaksana keputusan memahami tentang tugas-tugas mereka. Terdapat tiga hal yang dapat dilihat untuk mengetahui keberhasilan komunikasi yaitu

a. penyaluran komunikasi, dalam hal ini pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada para pengelola pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Ibu

Endang Purwaningsih. SH.MM selaku kabid penanaman modal DPMTSP Kabupaten Jepara, beliau menyampaikan:

> "komunikasi dilakukan oleh pemerintah agar tercapainya tujuan dari perda dengan melakukan penwaran-penawaran kepada calon investor serta keikut sertaan dalam berbagai macam lomba" (wawancara, Endang Purwaningsih. SH.MM)

b. Terdapat kejelasan mengenai sebuah informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada para calon investor
c. Konsistensi dalam upaya melakukan penawaran investasi di bidang pariwsata. Dalam hal ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penawaran dengan konsisten setiap tahunnya dengan program yang di prakarsai oleh BI. Hal ini disampaikan oleh Ibu Endang Purwaningsih. SH.MM selaku Kabid Penanaman Modal DPMTSP Kabupaten Jepara, Beliau menyampaikan :

> "Dalam melakukan penawaran invesatasi secara rutin setiap tahunnya, kita selaku pemerintah daerah sudah melakukannya dengan konisten setiap tahunnya, ada 4 obyek wisata yang kita tawarkan, akan tetapi belum ada yang berminat untuk berinvestasi"

2. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi hal yang penting sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan selain komunikasi, terdapat beberapa sumberdaya yang dimaksud dalam hal ini yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial serta fasilitas, wewenang dan juga informasi.

a. Sumber daya manusia yamg di maksud dalam hal ini yaiitu pegawai atau staff yang bekerja dan melaksanakan implementasi sebuah kebijakan, staff atau pegawai yang melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 antara lain yaitu Dinas Pariwasata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, yang mana pihak-pihak tersebut paling berkompeten dan saling berkolaborasi untuk melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2018 ini.

b. Telah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara guna penyaluran informasi mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2018 kepada para pengelola wisata serta para calon investor
c. Dalam hal wewenang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memiliki wewenang dalam mensosialisasikan serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan didalam Perda Nomor 6 Tahun 2018
d. Berkaitan dengan sumber daya finansial, sarana dan prasarana guna menunjang implementasi kebijakan ini sudah diatur dan di persiapkan dengan sedemikian rupa, oleh sebab itu ketika akan melaksanakan kegiatan penawaran kepada calon investor atau proses dalam melakukan invesatasi.

3. Disposisi Implementor

Disposisi adalah hal dalam kesediaan aktor atau implementor untuk melakukan implementasi kebijakan, disposisi berisikan tentang komitmen, kompetensi dan kapabilitas. Apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif maka besar kemungkinan proses implementasi akan berjalan dengan efektif. Bisa disimpulkan disposisi ialah karakteristik yang dimiliki oleh seorang pelaksana kebijakan, menurut Ibu Endang Purwaningsih. SH.MM selaku Kabid Penanaman Modal DPMTSP Kabupaten Jepara belaiu menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

> "sumber daya manuasia yang dimiliki sudah cukup memadai, sarana prasarana juga sudah cukup baik" (wawancara, Endang Purwanigsih, SH,MM)

Pihak pemerintah tentunya sangat mendukung tentang adanya perda ini, akan tetapi banyak dari staff maupun pegawai yang belum mengetahui adanya perda ini dikarenakan kurangnya sosisalisasi mengenai proses implementasi kebijakan dalam perda tersebut masih sangat kurang, oleh karena itu banyak dari berbagai pihak yang berhubungan dengan perda tersebut belum mengetehui tentang

adanya perda tersebut. Pihak pemerintah telah melakukan beberapa program sepserti keikut sertaan dalam lomba tahunan tingkat Jawa tengah maupun tingkat Nasional mengarah pada implementasi Perda Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak muncul fragmantasi birokrasi yang berujung menurunkan efektivitas dari sebuah kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Bagian dari struktur birokrasi ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi, dengan adanya dua bagian tersebut diharapkan mampu untuk menuntun jalannya Perda Daerah Nomor 6 Tahun 2018 sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan.

a. Standard Operation Procedure (sop)

   merupakan suatu ukuran dasar dalam prosedur kerja yang dilakukan secara rutin oleh para pelaku kebijakan berdasarkan standar yang telah di tetapkan. Dalam hal ini Kabid Penanaman Modal Dpmtsp Kabupaten Jepara menyampaikan bahwa:

   "Pihak pemerintah dalam menjalakan sebuah kebijakan untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan telah menggunakan SOP (Standard Operation Procedure) yang jelas agar mampu berjalan dengan semestinya"

b. Fragmentasi

   Merupakan pembagian tanggung jawab, aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan dalam beberapa unit kerja sehingga diperlukannya komunikasi serta koordinasi yang baik. Pembagian tugas untuk melaksanakan kebijakan ini telah dilakukan oleh Disparbud Kbupaten Jepara, bukan lagi antar unit kerja akan tetapi antar instansi terkait untuk sama-sama berkolaborasi melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam hal ini Kabid Penanaman Modal DPMTSP Kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

> “Dalam mengimplementasikan kebijakan agar tercapainya tujuan dari Perda ini, pihak DPMTSP sudah melakukan pembagian tugas kepada para unit2 yang berhubungan dengan implementasi perda”

A. Hambatan Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan yang sudah di jelaskan, menurut George Edward III terdapat empat hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, struktur birokrasi, dimana empat hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan apabila tidak dijalankan dengan baik, akan terjadi hambatan maupun kendala dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, berikut beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018.

1. Lingkup Kebijakan

Menurut Ibu Endang Purwaningsih. SH.MM selaku Kabid Penanaman Modal DPMTSP Kabupaten Jepara, berdasarkan hasil wawancara telah dijelaskan mengenai standar dan tujuan kebijakan bahwa :

> “Pihak pemerintah dalam menjalankan tujuan kebijakan telah melakukannya sesuai dengan SOP yang berlaku, akan tetapi pihak pemerintah masih belum bisa memaksimalkan untuk mendapatkan investor yang bersedia ber inestasi pada lingkup pariwisata kita”

Pihak pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku akan tetapi, pada beberapa lingkup kebijakan terdapat banyak kekurangan serta diperlukannya peningkatan terutama dalam masalah penawaran investasi kepada para calon investor, sejauh ini pihak DPMTSP hanya melakukan penawaran-penawaran saja, akan tetapi masih belum berhasil

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijaikan selain faktor komunikasi, sumber daya manusia sangat menetukan keberhasilan sebuah kebijakan, selain itu ada juga sumber daya finansial, informasi, dan juga sumber daya alam tidak kalah pentingnya sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan. Kabupaten jepara memiliki banyak sekali sumber daya alam mulai dari laut sampai pegunungan, jika dikelola dengan baik dan tepat akan membuat kabupaten Jepara menjadi tujuan nomor 1 bagi para wisatawan jawa tengah, berikut beberpa kendala dalam melaksanakan kebijakan PERDA Nomor 8 Tahun 2018:

a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang masih minim membuat komunikasi serta program pemerintah tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, komunikasi pemerintah dengan pengelola wisata juga tidak berjalan dengan baik
b. Minimnya sumbedaya manusia yang berkompeten membuat destinasi wisata yang berjalan secara mandiri sangat kesusahan untuk berkembang, serta menjaga konsitenan wisatawan yang berkunjung. Kurangnya keterlibatan anak muda untuk ikut serta dalam pengembangan wisata mandiri juga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pengembangan tempat wisata, apalagi di era modern seperti ini dibutuhkan kreatifitas yang cukup tinggi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki serta melakukan pemasaran di era digital sekarang ini membutuhkan keahlian kusus yang masih belum dimiliki oleh banyak tempat wisata. minimnya fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia di tempat wisata yang berjalan dengan mandiri membuat minat berkunjung bagi para wisatan menurun dan terkesan tidak tertarik.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan keterangan yang diberikan oleh para pengelola wisata, bahwa:

> “tidak terjalinnya komunikasi yang baik dari pihak pengelola wisata kepada pemerintah membuat sering terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat” (wawancara)

> “kurangnya sosialisasi maupun pendampingan dari pihak pemerintah dalam melakukan promosi tempat wisata membuat terkendalanya pengembangan tempat wisata di era digital seperti sekarang” (wawancara)

Sesuia dengan keterangan bapak (wawancara)

3. Disposisi Implementor

Berdasarkan dari hasil wawncara terhadap bapak S, Kendar Praptomo sebagai pihak Disparbud kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

> “Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sudah cukup memadai, serta kebutuhan lain seperti sarana dan prasarana juga cukup baik, dan kita akan terus meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang berjalannya implementasi kebijakan”

Mengenai pernyataan tersebut pemerintah merasa kebutuhan penunjang implementasi kebijakan yang tersedia sudah cukup baik serta masih perlu di tingkatkan lagi, pihak pemerintah juga berupaya untuk terus dapat melakukan pengembangan berkelanjutan pada obyek wisata dengan melakukan berbagai macam upaya untuk terus mendukung kemajuan industri pariwisata di kabupaten Jepara.

4. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah dengan pihak pengelola maupun kelompok UKM di obyek wisata menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan pengelola maupun stakeholder membuat pemicu untuk permaslahan-permasalahan yang lain. Komunikasi antar instansi juga kurang berjalan dengan baik, seperti komunikasi antara Disparbud dengan DPMTSP kurang berjalan dengan baik untuk membahas perinvestasian pada lingkup pariwisata, ketidak sepakatan pada visi misi perinvestasian membuat dampak positif kurang dirasakan oleh masyrakat maupun

pada obyek wisatanya sendiri. Saling lempar tanggung jawab antar instansi ini juga terjadi untuk masalah investasi di bidang pariwisata Mengenai hal ini pihak pemerintah sudah merasa berusaha untuk tujuan perda dapat berjalan dengan baik akan tetapi pada realita lapangan yang terjadi justru sebaliknya, obyek wisata potensial saja yang mendapat dukungan dari pemerintah lain halnya dengan obyek wisata yang berjalan dengan mandiri kurang dapat dukungan maupun perhatian dari pihak pemerintah.

B. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi Di Bidang Pariwisata Agar Berjalan Sesuai Dengan Tujuan Perda Yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Dinas P ariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Bapak yaitu S. Kendar Praptomo S.H, MM (30 September 2020) selaku Kabid Destinasi Wisata Disparbud Kabupaten Jepara mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jepara dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi Perda No, 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabuten Jepara, dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata Jepara, pemerintah membuat kepelatihan khusus untuk para pengelola wisata agar terciptanya pariwisata yang berkualitas dan mampu untuk bersaing dengan pariwisata daerah lain.

1. Dalam meningkatkan dan mengembangkan industri pariwisata serta membentuk SDM yang mumpuni, setiap tahunnya Disparbud Kabupaten Jepara mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada para pengelola obyek pariwisata yang di kelola oleh pemerintah maupun tidak dengan materi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan misalnya pemberian materi tentang pengembangan industri pariwisata berbasis modern dengan memanfaatkan teknologi.
2. Meningkatkan sarana prasarana pemasaran pariwisata dengan diberikannya fasilitas melalui event-event yang dilakukan di obyek pariwisata.
3. Dalam melakukan perlindungan kepada usaha industri pariwisata, pihak pemerintah memberikan kepastian berusaha untuk industri pariwisata Jepara dengan diberlakukannya perijinan dibidang perindustrian melalui OSS atau dikenal sebagai ijin usaha.

Pernyataan dari pihak Disparbud, berbanding terbalik dengan pernyataan dari seluruh responden yang diwawancara yaitu berjumlah 6 responden yang merupakan pengelola obyek wisata. Menurut seluruh responden atau dapat dikatakan responden menyatakan bahwa pemerintah jarang sekali membangun komunikasi terkait implementasi kebijakan tersebut sehingga pariwisata kota Jepara hanya itu-itu saja yang terkenal. Dalam penerapan Perda ini tentunya komunikasi antara pihak pemerintah dan pengusaha mebel sangat penting, tidak hanya kepada beberapa pihak pengelola obyek wisata yang terkenal saja, akan tetapi menyeluruh kepada wisata Kabupaten Jepara secara luas, pemerintah perlu memperhatikan jalinan komunikasi dan memastikan bahwa seluruh pengelola obyek wisata mengetahui maksud dan tujuan pemerintah dalam menjalankan upaya pengembangan industri pariwsata dapat dirasakan oleh semua masyarakat,

Dalam lingkup peningkatan kualitas SDM maupun pariwisata, 5 dari 6 responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui jika pemerintah melakukan peningkatan kualitas pariwisata, ini dikarenakan mereka tidak merasakan peningkatan kualitas secara menyeluruh hanya obyek wisata tertentu saja yang kerap mendapat perhatian, hal ini diukungkapkan oleh Bapak Widodo, Bapak Zulyanto, Bapak Siradj, Bapak Kuswanto, Bapak Suhadi, Bapak Abdul Jalal, Bapak Nuhadi, dan Bapak Nur Khalim dalam wawancara, bahwa :

> “kurang tau apakah pemerintah melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pariwsata secara merata, karena hanya obyek wisata itu-itu saja yang nampak”

Tidak maksimalnya implementasi dari Perda ini dirasakan oleh para masyarakat secara umum maupun yang bergelut di industri pariwisata, hal ini sangat bertentangan dengan Perda No. 6 Tahun 2018 BAB III Pasal 5 ayat 2,3,6,7 yang tertulis bahwa:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya Tarik wisata.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sector pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan arah pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara, para responden secara keseluruhan sudah mrasakan dampaknya, akan tetapi belum berjalan secara maksimal, lagi-lagi masalah pemerataan pembangunan menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan, hal itu berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga bertentangan dengan Perda No. 6 Tahun 2018 BAB III Pasal 7 yang berbunyi:

1. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah dan lintas pelaku
3. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, daya Tarik wisat dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan pengembangan kawasan;
4. Pengembangan daya tarik wisata berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam dan buatan yang berlandaskan kearifan local
5. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lindungan;dan
6. Tata kelola kepariwisataan yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari 6 responden memberikan penjelasakan bahwa menurut mereka arah pembangunan kepariwisataan sudah dirasakan oleh masyarakat seperti tersedianya fasilitas-fasilitas baru yang dibangun oleh pemerintah, berbagai macam fasilitas tersebut sangat membantu obyek wisata dalam menuju wisata

yang berkualitas, seperti tersedianya tourism center di Pantai Tirto Samudro Bandengan, Gedung Serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan acara, tempat parkir yang memadai, serta pembangunan ruko untuk UKM agar tertata dengan rapi di Pantai Tirto Samudro Bandengan. Responden lainnya mengatakan hal yang sebaliknya di tempat obyek wisata lain seperti Pantai Teluk Awur, Pantai Semat, kurang tertata rapi, serta minim fasilitas penunjang. Responden lainnya menberikan keterangan yang positif terhadap arah pembangunan kepariwisataan dengan memberi contoh Pantai Pungkruk yang dulunya terkenal dengan stigma negatif dikarenakan maraknya karaoke yang berdiri di lokasi obyek wisata tersebut, akan tetapi

BAB V

IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUK KEPARIWISATAAN DAERAH KABUTEN JEPARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PARIWISATA JEPARA

A. Implementasi perda no 6 tahun 2018 tentang rencana pembangunan induk kepariwisataan daerah kabupaten Jepara.

Pemerintah kabupaten Jepara menetapkan perda no 6 tahun 2018 dengan tujuan untuk meningkatkan serta memperluas jangkauan wisata dikabupaten jepara, guna menciptakan pariwasata yang berkualitas yang menjadi daya tarik wisatawan sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Menurut George III Implementasi Kebujakan dapat dipengaruhi oleh empat hal yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, keempat hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut penjelasannya.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda Nomor 6 tahun2 018, oleh sebab itu implementasi yang efektif serta efesien dapat terlaksana jika para pelaksana keputusan memahami tentang tugas-tugas mereka. Terdapat tiga hal yang dapat dilihat untuk mengetahui keberhasilan komunikasi yaitu

a. Transmisi atau penyaluran komunikasi, dalam hal ini pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada para pengelola pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Bapak S. Kendar Praptomo S.H, MM Kabid Destinasi Pariwisata Kabupaten Jepara, beliau menyampaikan:

   “Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar implementasi kebijakan dapat terlaksana yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepelatihan kepada pengelola wisata, masyarakat, yang dikelola maupun yang tidak dikelola oleh Dinas Pariwisata agar bisa mengembangkan wisata di desanya masing-masing di Kecamatan Kota Jepara”

d. Terdapat kejelasan mengenai sebuah informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada para pengelola wisata yang dikelola oleh pemerintah melaluli Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan maupun yang tidak dikelola.

e. Konsistensi dalam upaya melakukan sosialisasi serta implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada para pengelola wisata meskipun belum secara rutin tiap bulan dilakukan sosialisasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak S. Kendar Praptomo S.H, MM selaku kabid Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Jepara, Beliau menyampaikan :

> "Dalam melakukan sosialisai kepada para pengelola wisata kita telah mengupayakan untuk terus melakukan sosialasi meskipun belum pasti tiap bulan ada atau tidak kegiatan tersebut tergantung dari anggaran yang diperoleh, setelah itu pihak Disparbud melakukan plot daerah wisata mana saja yang akan dilakukan sosialisasi."

2. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi hal yang penting sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan selain komunikasi, terdapat beberapa sumberdaya yang dimaksud dalam hal ini yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial serta fasilitas, wewenang dan juga informasi.

e. Sumber daya manusia yamg di maksud dalam hal ini yaiitu pegawai atau staff yang bekerja dan melaksanakan implementasi sebuah kebijakan, staff atau pegawai yang melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 antara lain yaitu Dinas Pariwasata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, yang mana pihak-pihak tersebut paling berkompeten dan saling berkolaborasi untuk melaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2018 ini.

f. Telah dilakukan sosialisasi maupun penyuluhan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara guna penyaluran informasi mengenai Perda Nomor 6 Tahun 2018 kepada para pengelola wisata
g. Dalam hal wewenang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memiliki wewenang dalam mensosialisasikan serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan didalam Perda Nomor 6 Tahun 2018
h. Berkaitan dengan sumber daya finansial, sarana dan prasarana guna menunjang implementasi kebijakan ini sudah diatur dan di persiapkan dengan sedemikian rupa, oleh sebab itu ketika akan melaksanakan kegiatan sosialisai maupun penyuluhan serta pembinaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Disposisi Implementor

Disposisi adalah hal dalam kesediaan aktor atau implementor untuk melakukan implementasi kebijakan, disposisi berisikan tentang komitmen, kompetensi dan kapabilitas. Apabila para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif maka besar kemungkinan proses implementasi akan berjalan dengan efektif. Bisa disimpulkan disposisi ialah karakteristik yang dimiliki oleh seorang pelaksana kebijakan, menurut Bapak S. Kendar Praptomo S.H, MM belaiu menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

> "Sebagai implementor sebuah kebijakan pihak pemerintah dapat melihat karakteristik yang dimiliki oleh implementor dari segi sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup baik serta sarana dan prasarana sudah memadai"

Pihak pemerintah tentunya sangat mendukung tentang adanya perda ini, akan tetapi banyak dari staff maupun pegawai yang belum mengetahui adanya perda ini dikarenakan kurangnya sosisalisasi mengenai proses implementasi kebijakan dalam perda tersebut masih sangat kurang, oleh karena itu banyak dari berbagai pihak yang berhubungan dengan perda tersebut belum mengetehui tentang

adanya perda tersebut. Pihak pemerintah telah melakukan beberapa program seperti pelatihan serta pembinaan dan pembangunan fasilitas di sektor wisata ini mengarah pada implementasi Perda Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak muncul fragmantasi birokrasi yang berujung menurunkan efektivitas dari sebuah kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Bagian dari struktur birokrasi ini adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi, dengan adanya dua bagian tersebut diharapkan mampu untuk menuntun jalannya Perda Daerah Nomor 6 Tahun 2018 sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan.

c. Standard Operation Procedure (sop)

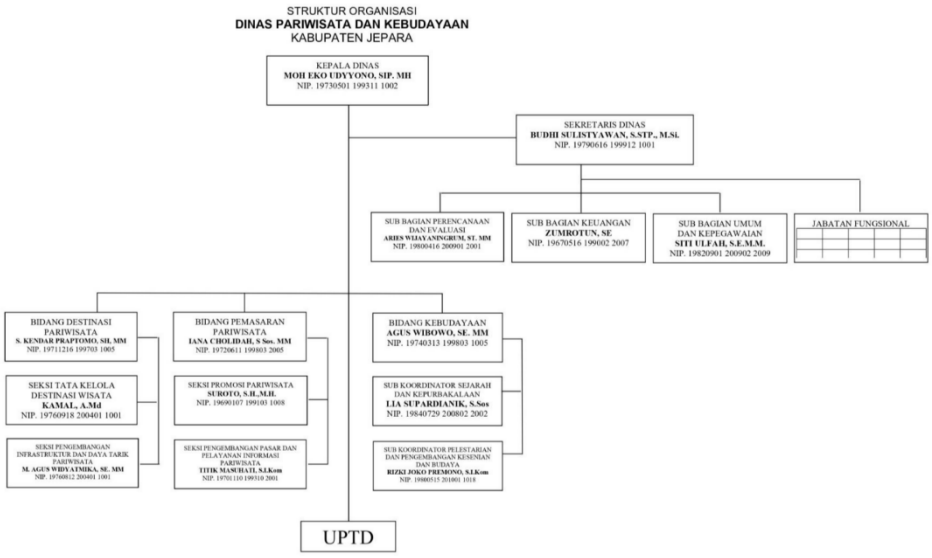
   merupakan suatu ukuran dasar dalam prosedur kerja yang dilakukan secara rutin oleh para pelaku kebijakan berdasarkan standar yang telah di tetapkan. Dalam hal ini Kabid Destinasi Wisata Disparbud Kabupaten Jepara menyampaikan bahwa:

   "Pihak pemerintah dalam menjalakan sebuah kebijakan untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan telah menggunakan SOP (Standard Operation Procedure) yang jelas agar mampu berjalan dengan semestinya"

d. Fragmentasi

   Merupakan pembagian tanggung jawab, aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan dalam beberapa unit kerja sehingga diperlukannya komunikasi serta koordinasi yang baik. Pembagian tugas untuk melaksanakan kebijakan ini telah dilakukan oleh Disparbud Kbupaten Jepara, bukan lagi antar unit kerja akan tetapi antar instansi terkait untuk sama-sama berkolaborasi melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam hal ini Kabid Destinasi Wisata Disparbud Kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

"Dalam mengimplementasikan kebijakan agar tercapainya tujuan dari Perda ini, Disparbud Kabupaten Jepara telah membagi tugas kepada unit kerjanya, termasuk dengan instansi lain yang berkaitan"



Gambar 2 Struktur Birokrasi DISPRBUD

B. Hambatan Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan yang sudah di jelaskan, menurut George Edward III terdapat empat hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, struktur birokrasi, dimana empat hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan apabila tidak dijalankan dengan baik, akan terjadi hambatan maupun kendala dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, berikut beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018.

1. Lingkup Kebijakan

Menurut Bapak S. Kendar Praptomo S.H, MM selaku Kabid Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Jepara, berdasarkan hasil wawancara telah dijelaskan mengenai standar dan tujuan kebijakan bahwa :

"Pihak pemerintah dalam menjalankan tujuan kebijakan telah melakukannya sesuai dengan SOP yang berlaku, akan tetapi pihak pemerintah masih belum bisa memaksimalkan pengembangan di sektor wisata secara menyeluruh dikarenakan masalah anggaran, pihak pemerintah memaksimalkan pengembangan wisata pada destinasi potensial wisata seperti wisata Pantai Bandengan dan Pantai Kartini. Untuk destinasi wisata lainnya terutama daerah wisata yang mandiri telah dilakukan sosialisasi maupun penyuluhan, akan teteapi kebanyakan wisata tersebut hanya mampu ramai pengunjung di awal-awal saja, masih sulit untuk menjaga konsistensi pengunjung yang mana hal tersebut berkaitan langsung dengan pengembangan wisata" .

Pihak pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku akan tetapi, pada beberapa lingkup kebijakan terdapat banyak kekurangan serta diperlukannya peningkatan terutama dalam masalah pengembangan sektor wisata secara merata dan meningkatkan jumlah wisatawan, mengenai hal ini pihak pemerintah masih belum melaksanakan pengembangan wisata secara merata, sejauh ini di fokuskan pada destinasi wisata potensial saja, pihak pemerintah terkendala oleh anggaran untuk melakukan pengembangan, jika dilihat dari jumlah obyek wisata di Kabupaten Jepara, Kabupaten Jepara memiliki 34 obyek wisata alam, maka sangat besar anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengembangan secara merata. Untuk mengatasi situasi ini pihak pemerintah telah berusaha melakukan sosialisasi maupun penyuluhan terhadap para pengelola wisata mandiri agar terus dapat berkembang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh pengelola wisata mandiri, bahwa:

"pemerintah jarang melakukan sosialiasi kepada para pengelola wisata mandiri, serta minimnya dukungan dari pemerintah membuat destinasi wisata yang berjalan secara mandiri sangat sulit untuk berkembang" (wawancara)

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijaikan selain faktor komunikasi, sumber daya manusia sangat menetukan keberhasilan sebuah kebijakan, selain itu ada juga sumber daya finansial, informasi, dan juga sumber daya alam tidak kalah pentingnya sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan. Kabupaten jepara memiliki banyak sekali sumber daya alam mulai dari laut sampai pegunungan, jika dikelola dengan baik dan tepat akan membuat kabupaten Jepara menjadi tujuan nomor 1 bagi para wisatawan jawa tengah, berikut beberpa kendala dalam melaksanakan kebijakan PERDA Nomor 8 Tahun 2018:

a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang masih minim membuat komunikasi serta program pemerintah tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, komunikasi pemerintah dengan pengelola wisata juga tidak berjalan dengan baik.
b. Terbatasnya anggaran untuk melakukan pengembangan destinasi wisata secara merata serta berkelanjutan.
c. Pihak pemerintah beranggapan bahwasanya kondisi pariwisata sudah terkelola dengan baik akan tetapi pada realitanya masih banyak masalah yang terjadi pada lingkup pariwisatanya sendiri, banyak terjadi masalah pada masalah pengelolaan pariwisata, pada destinasi wisata pantai bandengan sering terjadi gesekan dari pihak pedagang dengan pemerintah, pihak pedagang sering dirugikan dengan kebijakan tempat parkir kendaraan yang dinilai jauh dari area pedagang. Hal ini terjadi dikarenakan pihak pemerintah tidak membangun komunikasi yang baik pada para pengelola wisata sehingga sering terjadi gesekan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pemasaran pariwisata serta ketidak konsitenan dalam menerapkan kebijakan mempengaruhi minat berkunjung bagi para wistawan.
d. Minimnya sumbedaya manusia yang berkompeten membuat destinasi wisata yang berjalan secara mandiri sangat kesusahan untuk berkembang, serta menjaga konsitenan wisatawan yang berkunjung. Kurangnya keterlibatan anak muda untuk ikut serta dalam pengembangan wisata mandiri juga

memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pengembangan tempat wisata, apalagi di era modern seperti ini dibutuhkan kreatifitas yang cukup tinggi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki serta melakukan pemasaran di era digital sekarang ini membutuhkan keahlian kusus yang masih belum dimiliki oleh banyak tempat wisata. minimnya fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia di tempat wisata yang berjalan dengan mandiri membuat minat berkunjung bagi para wisatan menurun dan terkesan tidak tertarik.

e. Sumber daya alam yang sulit untuk dijangkau membuat pemerintah serta masyarakat sekitar terkendala untuk mengoptimalkan potensi wisata alam yang dimiliki, akses jalan yang kurang memadai serta medan yang cukup berat menjadi hambatan untuk pengembangan wisata alam, di lain sisi Kabupaten Jepara banyak memiliki air terjun yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan keterangan yang diberikan oleh para pengelola wisata, bahwa:

"tidak terjalinnya komunikasi yang baik dari pihak pengelola wisata kepada pemerintah membuat sering terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat" (wawancara)

"kurangnya sosialisasi maupun pendampingan dari pihak pemerintah dalam melakukan promosi tempat wisata membuat terkendalanya pengembangan tempat wisata di era digital seperti sekarang" (wawancara)

Sesuia dengan keterangan bapak (wawancara)

3. Disposisi Implementor

Berdasarkan dari hasil wawncara terhadap bapak S, Kendar Praptomo sebagai pihak Disparbud kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

"Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sudah cukup memadai, serta kebutuhan lain seperti sarana dan prasarana juga cukup baik, dan kita akan

terus meningkatkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang berjalannya implementasi kebijakan"

Mengenai pernyataan tersebut pemerintah merasa kebutuhan penunjang implementasi kebijakan yang tersedia sudah cukup baik serta masih perlu di tingkatkan lagi, pihak pemerintah juga berupaya untuk terus dapat melakukan pengembangan berkelanjutan pada obyek wisata dengan melakukan berbagai macam upaya untuk terus mendukung kemajuan industri pariwisata di kabupaten Jepara.

4. Komunikasi

Salah satu tantangan krusial yang turut memengaruhi keberlanjutan Pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Jepara adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah daerah, pengelola objek wisata, dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Komunikasi yang tidak berjalan secara efektif antara pemerintah dan pihak pengelola wisata sering kali menjadi pemicu munculnya permasalahan yang lebih kompleks. Ketika peraturan dan kebijakan dibuat tanpa melibatkan suara dari lapangan, banyak hal yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal justru terabikan (Nugroho, 2022).

Kondisi ini semakin diperburuk dengana danya hambatan koordinasi lintas instansi di dalam pemerintah itu sendiri. Misalnya, hubungan kerja antara Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud) dengan Dinas Penanaman dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih sering mengalami ketidaksinkronan, khususnya dalam hal investasi pariwisata. Ketidakselarasan dalam visi dan misi pengembangan investasi menyebakan banyak peluang investasi yang seharusnya mampu meningkatkan kualitas objek wisata menjadi tidak optimal. Tidak jarang terjadi Tarik ulur kepengtingan dan bahkan saling melempar tanggung jawab dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pengembangan destinasi wisata, terutama yang melibatkan investor dari luar daerah (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2023). Lebih jauh lagi, terdapat ketimpangan dalam dukungan terhadap objek wisata. Pemerintah daerah cenderung memberikan perhatian lebih pada destinasi yang sudah populer dan memiliki potensi ekonomi besar, seperti Karimunjawa atau Pantai Kartini. Objek-objek wisata lain yang dikelola secara swadaya

oleh masyarakat atau komunitas lokal sering kali harus berjuang sendiri untuk bertahan dan berkembang, dengan minimnya bantuan teknis maupun anggaran dari pemerintah. Padahal, destinasi-destinasi wisata yang dikelola mandiri tersebut menyimpan potensi luar biasa sebagai alternatif pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan dan inklusif (Astuti, 2009).

Kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara perencanaan dan implementasi. Pemerintah mengklaim telah berusaha menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan wisata secara menyeluruh. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu mencerminkan semangat regulatif tersebut. Banyak pelaku wisata mengeluhkan minimnya dialog terbuka dengan pihak dinas terkait, bahkan dalam program-program yang secara langsung menyentuh objek wisata mereka (Wibowo, 2015).

Dalam situasi seperti ini, perlu ada pembaruan sistem komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang lebih terstruktur, transparan, dan partisipatif. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pelaku usaha wisata dan masyarakat lokal sebagai pemilik langsung dari nilai budaya dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata. Di sisi lain, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan agar memiliki pemahaman holistik terhadap prinsip pariwisata berkelanjutan, serta kemampuan dalam memfasilitasi kolaborasi lintas sektor (Soemarno, 2003). Hanya dengan membangun komunikasi yang inklusif dan memperkuat koordinasi lintas institusi, arah pengembangan pariwisata Jepara dapat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pada segelintir objek wisata yang telah mapan. Pendekatan pembangunan pariwisata yang bersifat menyeluruh, adil, dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sektor ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Jepara.

C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata Agar Berjalan Sesuai Dengan Tujuan Perda Yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Dinas P ariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Bapak yaitu S. Kendar Praptomo S.H, MM (30 September 2020) selaku Kabid Destinasi Wisata Disparbud Kabupaten Jepara mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jepara dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi Perda No, 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabuten Jepara, dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata Jepara, pemerintah membuat kepelatihan khusus untuk para pengelola wisata agar terciptanya pariwisata yang berkualitas dan mampu untuk bersaing dengan pariwisata daerah lain.

1. Dalam meningkatkan dan mengembangkan industri pariwisata serta membentuk SDM yang mumpuni, setiap tahunnya Disparbud Kabupaten Jepara mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada para pengelola obyek pariwisata yang di kelola oleh pemerintah maupun tidak dengan materi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan misalnya pemberian materi tentang pengembangan industri pariwisata berbasis modern dengan memanfaatkan teknologi.
2. Meningkatkan sarana prasarana pemasaran pariwisata dengan diberikannya fasilitas melalui event-event yang dilakukan di obyek pariwisata.
3. Dalam melakukan perlindungan kepada usaha industri pariwisata, pihak pemerintah memberikan kepastian berusaha untuk industri pariwisata Jepara dengan diberlakukannya perijinan dibidang perindustrian melalui OSS atau dikenal sebagai ijin usaha.

Pernyataan dari pihak Disparbud, berbanding terbalik dengan pernyataan dari seluruh responden yang diwawancara yaitu berjumlah 6 responden yang merupakan pengelola obyek wisata. Menurut seluruh responden atau dapat dikatakan responden menyatakan bahwa pemerintah jarang sekali membangun komunikasi terkait implementasi kebijakan tersebut sehingga pariwisata kota Jepara hanya itu-itu saja yang terkenal. Dalam penerapan Perda ini tentunya komunikasi antara pihak

pemerintah dan pengusaha mebel sangat penting, tidak hanya kepada beberapa pihak pengelola obyek wisata yang terkenal saja, akan tetapi menyeluruh kepada wisata Kabupaten Jepara secara luas, pemerintah perlu memperhatikan jalinan komunikasi dan memastikan bahwa seluruh pengelola obyek wisata mengetahui maksud dan tujuan pemerintah dalam menjalankan upaya pengembangan industri pariwsata dapat dirasakan oleh semua masyarakat,

Dalam lingkup peningkatan kualitas SDM maupun pariwisata, 5 dari 6 responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui jika pemerintah melakukan peningkatan kualitas pariwisata, ini dikarenakan mereka tidak merasakan peningkatan kualitas secara menyeluruh hanya obyek wisata tertentu saja yang kerap mendapat perhatian, hal ini diukungkapkan oleh Bapak Widodo, Bapak Zulyanto, Bapak Siradj, Bapak Kuswanto, Bapak Suhadi, Bapak Abdul Jalal, Bapak Nuhadi, dan Bapak Nur Khalim dalam wawancara, bahwa :

> "kurang tau apakah pemerintah melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pariwsata secara merata, karena hanya obyek wisata itu-itu saja yang nampak"

Tidak maksimalnya implementasi dari Perda ini dirasakan oleh para masyarakat secara umum maupun yang bergelut di industri pariwisata, hal ini sangat bertentangan dengan Perda No. 6 Tahun 2018 BAB III Pasal 5 ayat 2,3,6,7 yang tertulis bahwa:

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya Tarik wisata.
6. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sector pariwisata.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan arah pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara, para responden secara keseluruhan sudah

mrasakan dampaknya, akan tetapi belum berjalan secara maksimal, lagi-lagi masalah pemerataan pembangunan menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan, hal itu berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga bertentangan dengan Perda No. 6 Tahun 2018 BAB III Pasal 7 yang berbunyi:

7. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
8. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah dan lintas pelaku
9. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, daya Tarik wisat dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan pengembangan kawasan;
10. Pengembangan daya tarik wisata berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam dan buatan yang berlandaskan kearifan local
11. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lindungan;dan
12. Tata kelola kepariwisataan yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari 6 responden, terungkap bahwa arah pembangunan kepariwisataan di daerah ini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Sebagian besar responden menyampaikan bahwa kehadiran berbagai fasilitas baru yang dibangun oleh pemerintah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata. Contohnya dapat dilihat di Pantai Tirto Samudro Bandengan, di mana kini telah tersedia tourism center yang memudahkan pengunjung dalam memperoleh informasi wisata, Gedung Serbaguna yang multifungsi untuk berbagai kegiatan masyarakat, area parkir yang lebih tertata, serta deretan ruko untuk pelaku UKM yang kini tampil lebih rapi dan menarik. Fasilitas-fasilitas ini tidak

hanya memperindah kawasan wisata, tetapi juga meningkatkan kenyamanan serta memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Namun demikian, tidak semua kawasan wisata mengalami perkembangan serupa. Beberapa responden menyampaikan bahwa objek wisata lain seperti Pantai Teluk Awur dan Pantai Semat masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi di kedua pantai tersebut dinilai kurang tertata dengan baik dan masih minim fasilitas penunjang, sehingga menimbulkan kesan bahwa pembangunan belum merata. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan wisata agar seluruh destinasi di wilayah ini memiliki standar pelayanan dan infrastruktur yang setara.

Sementara itu, responden lainnya menggarisbawahi arah positif dalam transformasi wisata di Pantai Pungkruk. Dulu, kawasan ini dikenal dengan stigma negatif akibat menjamurnya tempat karaoke yang kurang ramah bagi wisata keluarga. Namun kini, perlahan-lahan citra tersebut mulai berubah. Pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis dengan melakukan relokasi tempat hiburan tersebut dan mengembangkan kembali kawasan wisata agar lebih bersahabat bagi pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk keluarga. Meski masih terdapat satu-dua tempat karaoke yang belum ditutup serta adanya ketidakjelasan dalam sistem pengelolaan, perubahan positif ini memberi harapan baru akan arah pembangunan wisata yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, suara dari para responden mencerminkan harapan dan kritik yang konstruktif terhadap upaya pembangunan pariwisata. Mereka menilai bahwa perubahan memang tengah berjalan, namun tantangan ke depan terletak pada bagaimana pembangunan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan inklusif, agar setiap objek wisata memiliki daya saing yang berimbang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

D. Hambatan Internal Dan Eksternal Dalam Iplementasi perda No. 6 Tahun 2018 Mengenai Pengembangan Obyek Wisata

Dalam melakukan pelaksanaan sebuah kebijakan, tentunya banyak kendala maupun masalah yang akan dihadapi, banyak faktor yang tidak bisa di perkirakan seperti bencana alam, dan kondisi sosial politik. Dalam menghadapi kendala pelaksanaan kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi, hal ini di sampaikan oleh Bapak S. Kendar Praptomo SH,MM selaku Kabid Destinasi Wisata, beliau Menyampaikan:

> ”Pihak pemerintah terus melakukan upaya untuk mensosialisasikan kepada desa-desa wisata agar dapat menjadi obyek wisata yang berkelanjutan” (wawancara, S Kendar Praptomo, SH,MM)

1. Faktor Internal

a. SDM yang tersedia kurang memadai untuk dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan di setiap desa-desa wisata.
b. Masih ditemukannya praktik-praktik yang tidak sehat oleh para pelaku UKM yang berada di obyek wisata dengan memasang tarif harga yang tidak sesuai, hal ini membuat citra sebuah obyek wisata menjadi negatif serta berpengaruh dalam minat berkunjung para wisatawan.
c. Ketidak sepemahaman antar instansi mempengaruhi sebuah kelancaran dalam melaksanakan kebijakan
d. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pengembangan obyek wisata menjadi hal yang sangat penting untuk dapat melakukan pengembangan obyek wisata secara tepat.
e. Ketidak sepemahaman antar instansi dapat berpengaruh dalam kondisi sosial maupun politik dalam lingkup pariwisata
f. Masih ditemukannya praktik yang tidak sehat seperti calo tiket kapal yang sangat merugikan para wisatawan, hal ini menjadi serius jika tidak di tangani dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara

2. Faktor Eksternal

a. Bencana alam, bencana alam sendiri tidak bisa dihindari oleh siapapun, seperti angin putting beliung, banjir, hingga gelombang ombak tinggi. Kabupaten Jepara yang mayoritas wisatanya adalah pantai sangat terpengaruh oleh kondisi alam.
b. Kondisi infrastukrur daerah sekitar Jepara, kondisi ini sangat penting bagi akses menuju kota Jepara bagi para wisatawan, apabila kondisi Jalan tersebut mengalami kendala akan berimbas pada wisatawan yang akan berkunjung sehingga memberikan efek pada jumlah wisatawan yang berkunjunng, dimana hal ini berkaitan dengan pendapatan obyek wisata.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. **Implementasi Perda No 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabuten Jepara Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Bidang Pariwisata**
   - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sstu Pintu harus bekerja secara maksikal agar dapat mendapatkan investor
   - Implementasi Perda Terkait Investasi kurang berjalan maksimal dikarenakan susah untuk mencari investor
   - Kurang terjadinya Kerjasama yang baik antara DPMTSP dengan DISPARBUD Kabupaten Jepara membuat program-program investasi obyek wisata kurang optomal
2. **Implementasi Perda No 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Induk Kepariwisataan Daerah Kabuten Jepara Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pariwisata Jepara**

   Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara

   - dianggap belum berjalan optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Akan tetapi ada aspek yang belum berjalan dengan optimal yaitu melakukan pembangunan serta pengembangan obyek wisata secara merata
   - Proses implementasi yang dinilai belum optimal terdapat pada pengembangan obyek wisata secara merata serta penambahan obyek wisata baru

B. SARAN

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada pengelola obyek wisata yang dikelola pemerintah maupun yang tidak

- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara perlu memberikan informasi mengenai daerah yang memiliki potensi wisata yang tinggi untuk dikembangkan
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara harus dapat berkolaborasi secara baik dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna melancarkan program investasi di bidang Pariwisata agar dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan investor
- Sosialisasikan mengenai kondisi obyek wisata yang akan dijadikan tempat investasi kepada masyarakat
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara perlu meningkatkan komunikasi dengan pihak pengelola obyek wisata diluar dari obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara harus lebih memperluas sosialisasi terkait program-program yang bersangkungan dengan PERDA Nomor. 2 Tahun 2012 yaitu pembangunan serta pengembangan obyek wisata
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus lebih banyak mengeluarkan program pelatihan untuk bisa meningkatkan pemikiran yang jauh lebih kreatif sehingga terciptanya pemberdayaan.

Daftar Pustaka

Abdoellah, A. Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta.

Admin. (2020, Juli 23). *Daftar Desa Wisasta* . Retrieved from DESWARA: http://www.deswara.com/daftar-desa-wisata/

Admin. (2021, Juli 25). *Pengembangan Aqua Edu Culture Park Panjang Island*. Retrieved from Central Java Invesment Platform: https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi/82

Astuti, Y. S. (2009). Perkembangan Industri Wisata di Kabupaten Jepara 1970–1990. Jurnal Sejarah dan Budaya, 11(2), 101–115.

Bachri, C. (2021). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah. *Journal Of Lex Generalis (JLS), Volume 2*(No 2).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. (2023). Kabupaten Jepara dalam Angka 2023. Jepara: BPS.

Creswell, J. W. (2008). *Research Design "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar .

Jupir, M. M. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Volume 1*(No 1).

Lestari, A. A. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA. *Jurnal Hukum Saras wati (JHS), volume 2* (No 2).

Novitasari, S., Santoso, S., & Rihandoyo. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jepara. *Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 3*(No 2).

Nugroho, R. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK DI NEGRA BERKEMBANG* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .

Nugroho, A. (2022). Strategi Pengembangan Wisata Religi dan Budaya di Kabupaten Jepara. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif.* Medan: Wal Ashri Publising.

Pallewa, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA. *KATALOGIS, Volume 4*(No 7).

Pemerintah Kabupaten Jepara. (2023). Laporan Tahunan Pariwisata Jepara. Jepara: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Purnaya, I. G., & Semara , I. T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management, Volume 8*(No 2).

Putri , S. M., Delianoor, N. A., & Nurasa, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi DalamPengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019). *Journal Moderat, Volume 6*(No 1).

Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimun Jawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9*(N o 2).

Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9*(No 2).

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasara Indonesia.

Rustiana, E., Abdullah, U. W., & Cupiadi, H. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN GARUT. *Conference on Public Administration And Society, Volume 1*(No1).

Sugiarto, & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. *Jurnal Administrasi Bisnis, 7*(1).

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Soemarno, S. (2003). Pengantar Pariwisata. Yogyakarta: Andi.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus* . Madura: UTM PRESS.

Wibowo, Y. (2015). Karimunjawa: Ekowisata Bahari dan Konservasi. Semarang: Lembaga Kajian Pesisir dan Laut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax.
E-mail : **dpmptsp.jepara@gmail.com**
J E P A R A 59411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 072/058
TENTANG
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dari UIN WALISONGO SEMARANG Nomor : 389/UN.10.6/K/KM.05.01/02/2024 , perihal Ijin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : Muhammad Abdul majjid
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 1806016020
4. Alamat : Bandengan rt 05 rw 02, Jepara, Jawa Tengah
5. Nama Lembaga : UIN WALISONGO Semarang
6. Penanggung Jawab : H. A. Gunawan, S.Ag, M.H
7. Maksud dan Tujuan : Ingin mengajukan penelitian guna memeperoleh data untuk melengkapi data penellitian saya
8. Judul Penelitian : Studi Implementasi Perda Nomor 6 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Jepara
9. Anggota Penelitian : -
10. Lokasi : DPMPTSP Kab. Jepara Dan DISPARBUD Kab. Jepara

Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
2. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pimpinan wilayah setempat.
3. Setelah penelitian selesai, agar memberitahu dan memberikan hasil penelitian kepada Bakesbangpol Kabupaten Jepara.
4. Surat keterangan penelitian ini berlaku tanggal 07-02-2024 s/d 07-04-2024



Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 12 Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

ERIZA RUDI YULIANTO,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dalam rangka untuk mencari data mengenai peneltian Studi Implementasi Perda No 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jepara. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

A. Identitas Informan
   1. Nama : Endang Purwaningsih, S.H, M.M
   2. Jenis Kelamin : Perempuan
   3. Umur : 57
   4. Jabatan : Kabid Penanaman Modal DPMTSP

B. Daftar Pertanyaan
   1. Apakah hambatan atau kendala didalam investasi di sektor pariwisata?
   2. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan jumlah investor di sektor pariwisata?
   3. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menarik minat para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisatasa Kabupaten Jepara?
   4. Berapakah jumlah investor yang masuk setelah diterbitkannya perda No 6 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jepara.?
   5. Bagaimana tahapan investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata kabupaten Jeapara?
   6. Bagaimanakah sumberdaya untuk mendukung implementasi kebijakan?
   7. Bagaimanakah komunikasi yang dilakukan pemerintah agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana?

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dalam rangka untuk mencari data mengenai peneltian Studi Implementasi Perda no 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jepara. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

A. Identitas Informan
   1. Nama : S. Kendar praptomo, S.H, M.M
   2. Jenis Kelamin : Laki-laki
   3. Umur : 52
   4. Jabatan : Kabid Destinasi Pariwisata DISPARBUD

B. Daftar Pertanyaan
   1. Apakah tujuan-tujuan Perda telah terlaksana dengan baik? Mengapa?
   2. Apakah hambatan atau kendala dalam pengembangan industri pariwisata?
   3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kualitas serta kuantitas SDM yang bergelut di bidang Pariwisata?
   4. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan daya tarik wisata?
   5. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan di industri pariwisata?
   6. Bagaimanakah pemngembangan sistem sarana pasrana pemasaran pariwisata?
   7. Pembinaan apakah yang dilakukan pemerintah untuk para pelaku industri pariwisata?
   8. Dari manakah pembiayaan dan pendanaan industri pariwisata Jepara?
   9. Bagaimanakah sumberdaya untuk mendukung implementasi kebijakan?
   10. Bagaimanakah komunikasi yang dilakukan pemerintah agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana?
   11. Adakah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor wisata melalui investasi?
   12. Bagaimanakah proses investasi di bidang pariwisata?
   13. Apakah hambatan atau kendala didalam investasi di sektor pariwisata?
   14. Berapakah jumlah investor yang masuk setelah diterbitkannya perda No 6 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Jepara.?
   15. Berapakah pendapatan daerah melalui sektor wisata?



Gambar 3 Wawancara Dengan Kepala Dinas DPMTSP



Gambar 4 Wawancara Dengan Kabid Destinasi DISPARBUD



Gambar 5 Wawancara Dengan Kabid Penanaman Modal DPMTS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Muhammad Abdul Majid
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Jepara, 03 September 2000
Agama	: Islam
Alamat Lebgkap	: Bandengan Rt 05 rw 02, Jepara
Nomor HP	: 082250721385
E-mail	: majidabdul146@gmail.com

Pendidikan

2004-2006	: TK. R.A Albarokah
2006-2012	: SDN 03 Bandengan
2012-2015	: SMPN 04 Jepara
2015-2018	: SMAN 1 Tahunan
2018-2025	: UIN Walisongo Semarang